



# Edukasi Konsumen

TRIWULAN I 2023 | [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)



Jalan Terang  
Kinerja Sektor  
Keuangan  
di 2023

# YUK, BELAJAR SERU DI LMSKU!

Kumpulkan **Poin** Pembelajaran dan Dapatkan **Merchandise** Menarik



**LMSKU OJK (Learning Management System Edukasi Keuangan OJK)** merupakan platform pembelajaran yang mandiri dan terintegrasi terkait literasi keuangan yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja secara gratis.

## CARA MENGAKSES LMSKU

1. Buka browser dan kunjungi <https://lmsku.ojk.go.id>
2. Registrasi akun dengan kode referral
3. Klik tautan aktivasi akun via e-mail
4. Masuk ke LMSKU
5. Akses modul pembelajaran
6. Tukarkan poinmu dengan merchandise

Tutorial lebih lengkap:

<https://linktr.ee/LMSkuOJK>



**Dewan Pelindung:**

Mahendra Siregar (Ketua Dewan  
Komisioner OJK)

**Dewan Penasehat:**

Friderica Widayarsi Dewi (Kepala  
Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku  
Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan  
Perlindungan Konsumen)

**Pemimpin Umum /Pemimpin  
Redaksi:**

Aman Santosa (Kepala Departemen  
Literasi, Inklusi Keuangan dan  
Hubungan Masyarakat), Rudy Agus  
Raharjo (Kepala Departemen  
Perlindungan Konsumen)

**Redaktur Ahli:**

Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi  
dan Edukasi Keuangan), Edwin Nurhadi  
(Direktur Pengembangan Inklusi  
Keuangan), Sekar Putih Djarot (Pit.  
Direktur Grup Komunikasi Publik);  
Mohammad Ismail Riyadi (Grup Literasi  
dan Inklusi Keuangan Syariah); Sabar  
Wahyono (Direktur Pelayanan  
Konsumen), Tri Herdianto (Direktur  
Pembelaan Hukum Perlindungan  
Konsumen), Relu Ginting (Direktur  
Penelitian Kebijakan dan Pengaturan  
EPK).

**Redaktur:**

Yulianta (Deputi Direktur Literasi  
dan Informasi)

**Redaksi:**

Anggota Tim Direktorat Literasi dan  
Edukasi Keuangan

**Alamat Redaksi:**

Bidang Pengawas Perilaku Pelaku  
Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan  
Perlindungan Konsumen OJK Menara  
Radius Prawiro Lantai 2, Komplek  
Perkantoran Bank  
Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2,  
Jakarta Pusat 10350  
Telepon: (021) 29600000  
Faksimili: (021) 3866032  
Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat  
diunduh pada minisite OJK:  
[sikapuangmu.ojk.go.id](http://sikapuangmu.ojk.go.id)

**Redaksi menerima kiriman  
naskah dan berhak mengedit  
naskah tanpa menghilangkan  
intisari dari artikel sebelum  
dipublikasikan**

**>> SALAM REDAKSI**

**Perbincangan mengenai potensi krisis global** yang akan berimbas pada perekonomian Indonesia masih mengemuka hingga hari ini. Sesuatu yang wajar dan manusiawi. Sebab, pengalaman pelambatan ekonomi akibat pandemi belum hilang dari ingatan kita.

Lantas, apakah krisis global benar-benar akan berimbas pada perekonomian Indonesia? Sebaiknya, kita semua tidak perlu “tebak-tebak buah manggis”. Tidak perlu menerka-nerka hal yang belum pasti, apalagi tidak memiliki dasar ilmunya. Mendengarkan pemangku kepentingan dan ahli di bidang ekonomi bisa jadi pilihan bagi orang awam.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, potensi terjadinya resesi global di tahun 2023 kemungkinan akan dialami oleh negara-negara maju. Sebaliknya, Indonesia kemungkinan akan terhindar dari ancaman situasi ekonomi buruk tersebut.

“Resesi ekonomi kemungkinan besar di negara-negara maju. Apakah di Eropa dan kemungkinan juga pertumbuhan yang makin lambat di Amerika Serikat kalau saya melihat. Sebaliknya di Indonesia ekonomi (2023) bisa di atas 5%,” ujar Mahendra dalam webinar Launching Aplikasi Otomasi/Informasi di Jakarta akhir 2022.

Hal senada disampaikan oleh Piter Abdullah Redjalam, Direktur Eksekutif Segara Institute. Piter menyatakan, krisis ekonomi sepertinya tidak akan mampir ke Indonesia. Bukan hanya tahun 2023 saja, tapi hingga beberapa tahun ke depan. Apalagi, tahun ini adalah tahun politik.

“Tahun politik, tentu banyak aktivitas politik yang akan meningkatkan permintaan domestik. Banyak belanja politik seperti bikin spanduk dan lain-lain yang akan meningkatkan perputaran uang. Aktivitas itu pada akhirnya meningkatkan konsumsi,” kata Piter.

Optimisme yang disampaikan Mahendra dan Piter perlu kita sambut dengan baik. Seperti pepatah lama, optimisme adalah separuh dari keberhasilan. Jadi mari kita jalani tahun 2023 dengan optimis.

## 2 SALAM REDAKSI

## 3 KABAR OTORITAS

- Upaya OJK dalam Mencerdaskan Kehidupan Ekonomi Bangsa

## 4 PERSPEKTIF

- Strategi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

## 14 EDUPERBANKAN

- Terlalu Tinggi, NIM Perbankan akan Dikaji

## 20 EDUINVEST

- Waspada Saham Gorengan! Belajar dari Kasus Adani Group

## 22 EDUIKNB

- Menatap Industri Keuangan Non-Bank di Tahun Kelinci Air

## 24 EDUSYARIAH

- Prospek dan Peluang Pasar Modal Syariah

## 26 EDUTECH

- Modus Penipuan Online untuk Menguras Rekening

## 28 FOKUS DUNIA

- Ekonomi Dunia Melambat, Indonesia Optimis Melesat

## 30 SOSOK

- **Ketua Himbara, Sunarso:** "Siap Antisipasi Resesi dengan Empat Skenario Mitigasi"

## 32 REGULASI

- Undang-undang P2SK, Perlindungan dari Investasi Bodong

## 34 BISNIS PEMULA

- Pesantren dan Peluang Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat

## 36 INVESTASI

- Emas, Investasi yang Tak Bikin Cemas

## 38 KONSUMEN BICARA

## 40 TELAAH PRODUK

- Berani Investasi di Reksa Dana Terproteksi

## 41 ANGKA BICARA

## 42 INSPIRASI

## 44 WACANA

## 46 LITERASI KEUANGAN PEDIA

## 47 QUIZ

## 48 SILAM KINI

### >> SAJIAN UTAMA



# 06

## Jalan Terang Kinerja Sektor Keuangan di 2023

Pencabutan status PPKM terkait pandemi Covid-19 ibarat lampu hijau yang membuat pelaku ekonomi bisa menekan gas lebih dalam.



# 10

## Catatan Penting PTIJK 2023

Pesan Presiden dan Strategi Sang Garda Keuangan Indonesia

# 16

## Mengenal Berbagai Program Edukasi dan Literasi Keuangan OJK

OJK masih akan terus berupaya meningkatkan program edukasi, literasi, dan perlindungan konsumen pada arah kebijakan prioritasnya di 2023.



# Upaya OJK dalam Mencerdaskan Kehidupan Ekonomi Bangsa

Salah satu cita-cita besar yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk cerdas di bidang literasi keuangan tentunya.

Otoritas Jasa Keuangan berperan aktif dalam upaya meningkatkan literasi keuangan di berbagai kalangan masyarakat.

Akhir Januari 2023, OJK menggelar kegiatan bertajuk Edukasi Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Ibu Rumah Tangga di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan produk jasa keuangan yang bisa memperbaiki perekonomian keluarga.

Mengapa perempuan dan UMKM yang jadi sasaran kegiatan? Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, perempuan berperan penting dalam mengelola keuangan keluarga.

"Kesejahteraan keluarga ada di tangan ibu-ibu semua, karena ibu-ibu yang paling bijaksana mengelola keuangan. Jadi kalo ibu-ibunya cerdas keuangan, keluarga di Marunda makin

sejahtera," kata perempuan yang biasa dipanggil Kiki Widyasari ini.

OJK rutin melakukan edukasi keuangan dengan beragam topik seperti perencanaan keuangan, tabungan emas, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga waspada investasi serta pinjaman *online* ilegal. Upaya berkelanjutan tersebut sudah menunjukkan hasil positif.

Pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 lalu, tampak adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dan untuk pertama kalinya, indeks literasi keuangan perempuan (50,33%) lebih tinggi dibanding laki-laki (49,05%).

Hasil survei tersebut mencerminkan bahwa kelompok perempuan saat ini sudah mulai sadar akan pentingnya literasi keuangan karena mereka merupakan *role model* pertama di lingkungan keluarga.

Di acara ini, warga Marunda juga dikenalkan pada mobil Simolek (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan). Mobil Simolek yang bisa

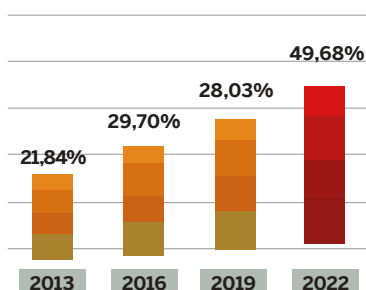


berkeliling ke pelosok-pelosok daerah ini diharapkan semakin meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

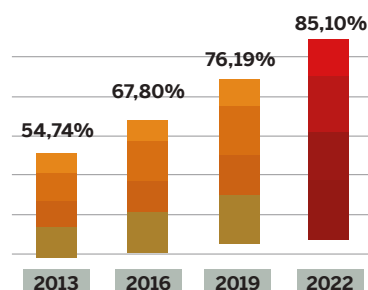
Program edukasi keuangan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh OJK ini juga berhasil meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia secara drastis. Pada 2019 misalnya, indeks inklusi keuangan Indonesia baru berada di angka 76%. Tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura (98%), Malaysia (85%), dan Thailand (82%).

Tapi pada 2022, Indonesia sudah bisa setara dengan Malaysia dan Thailand dengan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%. Peningkatan ini tak lepas dari upaya OJK dalam mengadakan edukasi kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Indeks literasi keuangan



Indeks Inklusi keuangan



## GLOSARIUM

• **Literasi keuangan:** Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku keuangan seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

• **Inklusi keuangan:** Ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

# Strategi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan forum Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada 6 Februari 2023.



Pertemuan ini disusun sebagai wadah penyampaian arah kebijakan OJK kepada pelaku jasa keuangan, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja OJK kepada publik. Tajuk yang diambil pada tahun ini adalah "Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Baru".

Serupa dengan tahun sebelumnya, PTIJK 2023 dilakukan melalui dua medium yaitu dalam jaringan (daring)

dan luar jaringan (luring). Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo hadir secara langsung untuk memberikan sambutan pada pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Presiden Jokowi mengutarakan beberapa poin penting yang harus

dijadikan fokus oleh OJK, salah satunya terkait perlindungan konsumen. Presiden menyoroti berbagai aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mulai dari asuransi, pinjaman *online*, sampai investasi. Menurutnya, aspek perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan kepercayaan publik, sehingga pengawasan yang ketat perlu diterapkan secara maksimal.

"Masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Pengawasan harus betul-betul dilakukan secara mendetail. Kita nggak bisa lagi kerja secara makro. Sekarang ini, semua harus diawasi secara mikro, harus detail, dicek satu per satu," tegas Presiden.

Beberapa kasus di sektor jasa keuangan juga sempat disentil oleh Presiden Jokowi. Mulai dari kasus goreng-menggoreng saham di pasar modal, hingga skandal gagal bayar di beberapa perusahaan asuransi jiwa. Salah satunya adalah kasus Adani Group sempat menghebohkan pasar keuangan dunia. Kasus Adani menunjukkan *fraud* sebuah perusahaan ternyata bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

"Adani kehilangan US\$120 miliar, itu langsung hilang. Bila dirupiahkan itu sekitar Rp 1800 triliun. Hati-hati mengenai ini," kata Presiden Jokowi.

Selain kasus di pasar modal, Presiden Jokowi juga menyinggung berbagai kasus lain dari sektor jasa keuangan seperti kasus pinjaman *online*, serta kasus PT Asabri, PT Asuransi Jiwasraya, Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) Indosurya, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Presiden Jokowi meminta OJK agar kasus-kasus yang sangat merugikan masyarakat seperti itu tidak lagi terulang.

## Strategi OJK melindungi konsumen

Menjawab tantangan dari Presiden Joko Widodo, di forum yang sama, Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan serangkaian upaya yang telah dilakukan dalam memperkuat sektor perlindungan konsumen. Di pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) misalnya, beragam upaya integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas terkait pengelolaan



keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa.

Sedangkan untuk Pasar Modal, OJK secara resmi pun telah meluncurkan Roadmap Pasar Modal

Secara garis besar, peraturan ini mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa.

investasi telah menjadi fokus kebijakan OJK sejak beberapa tahun ke belakang.

Mahendra mengatakan penguatan industri jasa keuangan juga akan dilengkapi dengan kebijakan peningkatan perlindungan konsumen dengan memberikan edukasi yang masif, meningkatkan literasi keuangan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, serta penguatan fungsi gugatan perdata oleh OJK.

Di pertengahan 2022, OJK juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penerbitan peraturan ini merupakan bentuk strategi dari OJK untuk terus memperkuat upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Secara garis besar, peraturan ini mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa

Indonesia 2023-2027. Roadmap ini ditujukan sebagai pedoman arah pengembangan Pasar Modal ke depan guna menciptakan Pasar Modal yang tangguh, stabil, dan tumbuh berkelanjutan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Lalu, untuk capaian penghimpunan dana, nilai 2022 meningkat signifikan dibanding 2018. Pasar Modal Indonesia telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp166,06 triliun (2018) dan meningkat menjadi Rp267,73 triliun (2022). Dana ini dihimpun dari penawaran umum saham dan obligasi/sukuk.

"OJK akan terus menjaga pencapaian dan stabilitas di Pasar Modal dengan senantiasa meningkatkan perlindungan konsumen," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi.

## OJK Melindungi Sepenuh Hati

OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan pada sektor keuangan, membuat kebijakan-kebijakan untuk melindungi hak konsumen. Secara garis besar ada dua cara untuk melindungi hak konsumen, yaitu secara preventif dan kuratif. Lantas apa bedanya?

**Perlindungan preventif** adalah upaya pencegahan melalui regulasi yang tepat dan pelaksanaan edukasi keuangan yang efektif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

**Perlindungan kuratif** adalah perlindungan yang dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi pelayanan pengaduan konsumen dan pelaksanaan pembelaan hukum perlindungan konsumen lembaga jasa keuangan.

Konsumen jasa keuangan dapat menyampaikan pertanyaan maupun pengaduan melalui layanan Kontak OJK 157 di nomor 08157157157.

# Jalan Terang Kinerja Sektor Keuangan di 2023

Pengumuman Presiden Joko Widodo pada 30 Desember terkait pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), disambut positif berbagai kalangan. Pencabutan status PPKM terkait pandemi Covid-19 ibarat lampu hijau yang membuat konsumen jasa keuangan bisa menekan gas lebih dalam.

Selama pemberlakuan PPKM di masa pandemi Covid-19, lampu lalu lintas ibarat berwarna kuning. Pelaku ekonomi harus berjalan pelan dan bersiap mengemir bila lampu tiba-tiba berwarna merah. Kebijakan pencabutan PPKM ini memunculkan optimisme bagi pelaku usaha, konsumen jasa keuangan, maupun

masyarakat secara umum.

Pencabutan PPKM melengkapi stabilitas ekonomi yang sudah terjadi pada tahun 2022. Di tahun 2022, stabilitas sektor jasa keuangan berhasil terjaga dengan baik, kendati situasi pandemi Covid-19 masih belum usai. Pandangan ini mencuat kala pelaksanaan Rapat Dewan Komisiner Bulanan OJK pada 28

Desember 2022, dua hari sebelum pencabutan status PPKM.

Tidak hanya stabilitas sektor jasa keuangan yang tetap terjaga, namun juga kinerja intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dinilai konsisten meningkat, sehingga dapat memper-tahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional.



Berkaca dari situasi pemulihan ekonomi 2022, OJK pun optimis bahwa pada 2023, kinerja sektor keuangan Indonesia masih akan terus membaik dan menunjukkan tren positif. Optimisme ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar dalam sambutannya pada pelaksanaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Februari 2023. Mahendra Siregar mengatakan bahwa keputusan pemerintah yang mengakhiri tanggap darurat pandemi Covid 19 jelas akan menjadi modal utama bagi pertumbuhan ekonomi di 2023.

“Stabilitas sektor keuangan yang tetap terjaga dan semakin kondusif untuk ke depannya ini merupakan buah hasil dari sinergi yang sangat kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maupun di masing-masing instansi,” tutur Mahendra kala memberi sambutan pada pelaksanaan PTIJK 2023.

## Optimisme OJK di 2023

Optimisme OJK terhadap kinerja sektor keuangan 2023 terletak pada sejumlah faktor, diantaranya inovasi teknologi dan regulasi yang terus berkembang. OJK percaya bahwa regulasi yang ketat dan terus

**Kita bisa lihat telah banyak bank yang memperkenalkan aplikasi perbankan *mobile* bagi pelanggan mereka dengan tujuan mempermudah aktivitas transaksi secara daring.**

diperbarui akan memastikan sektor keuangan tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan yang tidak terduga di pasar keuangan. Di sisi teknologi, inovasi juga akan memainkan peran penting dalam kinerja sektor keuangan pada 2023. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, kemudahan transaksi hingga digitalisasi akan meningkatkan efisiensi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Inovasi ini akan membantu sektor keuangan terus tumbuh dan berkembang. Terlebih, bank-bank di Indonesia telah terlihat keseriusan dan fokusnya pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah.

“Kita bisa lihat telah banyak bank yang memperkenalkan aplikasi perbankan *mobile* bagi pelanggan mereka dengan tujuan mempermudah aktivitas transaksi secara daring. Selain itu, nasabah juga bisa lebih mudah dalam memantau aktivitas rekening mereka

secara waktu yang nyata,” tambah Mahendra.

Dalam forum PTIJK 2023, Mahendra memproyeksikan bahwa di 2023, kredit perbankan masih akan tumbuh sebesar 10% hingga 12%, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7% hingga 9%.

Sementara di Industri Keuangan non Bank (IKNB), piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 13% hingga 15% sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara, aset asuransi jiwa dan asuransi umum diperkirakan tumbuh sebesar 5% hingga 7% di tengah program reformasi yang dilakukan OJK.

Berkaca dari peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan, pertumbuhan dana pihak ketiga, piutang pembiayaan, aset asuransi, dan perkembangan sektor jasa keuangan syariah merupakan bukti kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan meningkat. Optimisme konsumen jasa keuangan merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.



### Reformasi Sektor Keuangan Indonesia

Pada 15 Desember 2022, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023. UU ini merupakan ikhtiar dari pemerintah dan DPR RI untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia.

Ada lima pilar penting dalam UU PPSK. Pertama, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi. Kedua, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik. Ketiga, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan

pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Keempat, perlindungan konsumen. Kelima, literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

Kala memberi sambutan pada pembukaan PTIJK 2023, Mahendra mengungkapkan bahwa OJK juga akan melakukan reformasi internal dalam kelembagaannya. Langkah tersebut diambil karena implementasi UU PPSK menuntut alokasi sumber daya yang besar. Terlebih, melalui UU PPSK ini, OJK juga mendapat amanat

**Tidak hanya mendapat amanat untuk mengatur aset kripto, aset digital dan bursa karbon, Undang-Undang PPSK memberikan tambahan tugas kepada OJK untuk melakukan penguatan dari sisi penegakan hukum di sektor keuangan.**

untuk melaksanakan pengawasan secara terintegrasi di seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, termasuk konglomerasi keuangan.

Tidak hanya mendapat amanat untuk mengatur aset kripto, aset digital dan bursa karbon, Undang-Undang PPSK memberikan tambahan tugas kepada OJK untuk melakukan penguatan dari sisi penegakan hukum di sektor keuangan. Melalui UU PPSK, OJK didaulat menjadi satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor

jasa keuangan. Pasal 48B ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa OJK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan.

“(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. (2) Sebelum menetapkan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan,” begitu bunyi UU PPSK Pasal 48B ayat 1 dan 2.

Pada pelaksanaan fungsi penyidikan tersebut, tim penyidik dari OJK akan didampingi oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu, dan pegawai tertentu. Dengan demikian komposisi dari tim penyidik OJK dipastikan akan memiliki kompetensi dan keahlian khusus di bidang industri jasa keuangan.

Bermodal kewenangan ini, OJK lebih leluasa dalam mengatasi masalah-masalah praktik keuangan ilegal, termasuk praktik teknologi finansial ilegal yang modusnya semakin beragam. Kewenangan ini juga akan mempermudah proses penegakan hukum dan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

#### GLOSARIUM

• **Indeks Harga Saham Gabungan:** Salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia.

• **Securities Crowdfunding:** Metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya.

• **Non Performing Financing:** Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola masalah pembiayaan yang ada.

• **Tindak pidana sektor jasa keuangan:** Setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.

## Beberapa wewenang dan tanggung jawab OJK sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan

- Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani.
- Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan atau dokumen.
- Meminta keterangan dari lembaga jasa keuangan tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- Menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



CATATAN PENTING PTIJK 2023:

# Pesan Presiden dan Strategi Sang Garda Keuangan Indonesia

**G**elaran Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 dengan tema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan Dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi” telah usai dilaksanakan pada 6 Februari 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan beberapa pesan kunci. Di acara ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memaparkan capaian, target serta tantangan yang akan dihadapi ke depan.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi tinggi pada kinerja industri jasa keuangan (IJK) kurun waktu 2022.

Setidaknya ada tiga sektor yang menjadi sorotan Presiden, yaitu industri perbankan, pasar modal, dan industri asuransi. di 2022, kinerja industri perbankan berhasil mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit hingga dua digit yaitu sebesar 11,03%.

Sedangkan untuk rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) perbankan melonjak hingga angka 25,68%, lebih tinggi dibandingkan pra pandemi yang berada di level 23,31%. Untuk margin bunga bersih, perbankan nasional juga berhasil mencatatkan margin bunga bersih (*net interest margin*/NIM) yang sangat tinggi yaitu sebesar 4,4%.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo merasa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan lebih jauh kinerja industri keuangan. Oleh karena itu, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo pun memberikan pesan dan permintaan kepada industri jasa keuangan, baik itu regulator, pemerintah terkait, maupun pelaku industri.

## Penyaluran Kredit ke UMKM Lebih Digenjot

Menyoroti pentingnya peran UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta pada pelaku Industri Jasa Keuangan (IJK)

untuk tidak meminggirkan peran sektor UMKM agar sektor UMKM dapat menggunakan dana kredit itu untuk mengembangkan bisnisnya.

Melansir laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk “Statistik Indonesia dalam Infografis 2022,” penyaluran kredit UMKM dari bank umum pada 2021 mencapai Rp1.221,02 triliun. Jumlah itu meningkat 12,19% dari tahun 2020 yang berjumlah Rp1.088,33 triliun.

Menurut catatan BPS, peningkatan terbesar kredit UMKM di 2021 yang berasal dari bank umum terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yakni naik 114% (*year-on-year*/yoy). Selanjutnya, penyaluran kredit dari bank umum untuk lapangan usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga naik 33,4% pada 2021 (yoy). Sementara penyaluran kredit pada lapangan usaha perikanan naik 29,21% (yoy). Sedangkan untuk pertanian, perburuan dan kehutanan naik 24,19% (yoy).

“Berikan suntikan (pendanaan) kepada mereka sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi. Karena di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat,” kata Presiden Joko Widodo.

## Dukungan OJK untuk Pembiayaan di Sektor Hilirisasi

Selain UMKM, Presiden Joko Widodo juga meminta OJK selaku regulator dapat mendorong industri jasa keuangan memberikan pembiayaan ke bisnis yang berbasis hilirisasi. Presiden menyatakan, hilirisasi menjadi kunci bagi Indonesia bila ingin menjadi negara maju, di semua komoditas, baik itu *Crude Palm Oil* (CPO), mineral dan batubara (minerba), maupun sumber daya alam sektor kelautan.

“Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas dari yang namanya nikel. Lompatan kita dari 1,1 miliar dollar AS menjadi 30 miliar



Lompatan kita dari 1,1 miliar dollar AS menjadi 30 miliar dollar AS setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak.

dollar AS setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak, kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan,” tuturnya.

Terakhir, Presiden meminta kepada OJK untuk memberikan perlindungan yang pasti kepada masyarakat terkait produk-produk jasa keuangan. OJK diharapkan mampu mengintensifkan pengawasan terhadap produk-produk jasa keuangan baik di asuransi, pinjaman *online*, dana pensiun, investasi.

“Saya melihat, masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman *online*, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail. Kita ini *nggak* bisa sekarang kerjanya makro, *nggak* bisa. Makro iya, mikro harus detail, dicek satu per satu,” pinta Presiden.

## Prioritas OJK di 2023

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra



Sedangkan untuk pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), fokus kebijakan OJK akan berpijak pada serangkaian upaya peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas terkait pengelolaan investasi.

Siregar menyampaikan bahwa OJK telah menyusun prioritas kebijakan untuk tahun 2023. Meski penuh rintangan, Mahendra optimis bahwa tren positif kinerja sektor keuangan akan berlanjut di 2023, terutama karena didukung oleh tingginya peningkatan aktivitas perekonomian domestik, seperti konsumsi dan investasi pasca pandemi Covid 19. Beberapa prioritas kebijakan tersebut adalah penguatan di sektor jasa keuangan, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan layanan dan penguatan kapasitas OJK.

Di sektor perbankan, kata Mahendra, untuk kedepannya, kebijakan akan mulai difokuskan pada penguatan permodalan dan konsolidasi, inovasi produk dan layanan, serta peningkatan efisiensi perbankan. Sedangkan untuk pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), fokus kebijakan OJK akan berpijak pada serangkaian upaya peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas terkait pengelolaan investasi. Sementara untuk industri perasuransian, upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan

kepercayaan masyarakat, melalui penyelesaian asuransi dan produk asuransi yang bermasalah, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74, penguatan fungsi aktuaris, dan penataan pemasaran produk asuransi.

Terkait rencana penerapan PSAK 74, OJK telah membentuk *Steering Committee* Persiapan Penerapan PSAK 74 dengan berkolaborasi dengan pihak Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi industri agar proses transisi berjalan lancar. OJK mendorong partisipasi perusahaan asuransi joint venture untuk menyampaikan *experience study* dalam hal penerapan IFRS 17, yang kemudian dapat dijadikan sebagai panduan atau *benchmark* oleh pelaku industri asuransi nasional dalam menerapkan PSAK 74 secara penuh pada 1 Januari 2025.

### Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

OJK, tutur Mahendra, akan melakukan peninjauan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi peran sektor keuangan. OJK akan mendorong sumber pendanaan yang mampu dioptimalkan melalui peningkatan minat investor terhadap instrumen investasi berkelanjutan dan hijau serta investasi syariah di Indonesia.

Selain itu, OJK juga menjalankan program peningkatan daya tarik investasi pasar keuangan domestik di antaranya dengan mendorong terciptanya institusi penyedia likuiditas, pengembangan infrastruktur dan produk derivatif di Bursa Efek Indonesia, serta mengoptimalkan penerapan prinsip *interoperability* antar pasar keuangan. Lebih jauh, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan, OJK juga mendukung penuh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah, seperti:

- Percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan akan ikut mengembangkan bentuk dukungan bagi beroperasinya Lembaga Jasa Keuangan di financial center IKN.
  - OJK akan terus memperkuat serangkaian kebijakan guna mendukung program hilirisasi komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam meningkatkan nilai tambahnya.
  - OJK akan memberikan insentif pada sektor yang saat ini masih memerlukan dorongan pemulihan lebih lanjut, seperti sektor properti.
- Mahendra melanjutkan, OJK juga berkomitmen untuk terus melakukan percepatan perluasan akses keuangan kepada pelaku UMKM guna mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan sosial.

### Peningkatan Layanan dan Penguatan Kapasitas OJK

Prioritas peningkatan layanan dan penguatan kapasitas OJK ini

OJK juga akan melakukan harmonisasi ketentuan dengan standar internasional, melakukan pengelolaan data dan informasi terintegrasi, serta mengembangkan pengawasan berbasis teknologi *Supervisory Technology* (Suptech) dan *Regulatory technology* (Regtech).

merupakan respons atas masukan dari industri, pemangku kepentingan, serta masyarakat. Respons ini akan dilakukan dalam bentuk:

- Memperluas pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memberikan kesetaraan level *playing field* antar industri jasa keuangan.
- Mempercepat implementasi perizinan *single window* serta memberikan layanan perizinan yang lebih cepat dan terintegrasi.
- Memberikan fasilitas koordinasi industri bagi jasa keuangan dengan otoritas dan lembaga lain untuk menghindari duplikasi tindakan, memberikan standar kesetaraan, dan memberikan kepastian hukum di sektor keuangan.

Selain itu, OJK juga akan melakukan penguatan kapasitas

kelembagaan OJK dan sektor jasa keuangan dengan mengedepankan integritas dan profesionalisme. Caranya, dengan melakukan akselerasi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Lebih lanjut, OJK juga akan melakukan harmonisasi ketentuan dengan standar internasional, melakukan pengelolaan data dan informasi terintegrasi, serta mengembangkan pengawasan berbasis teknologi *Supervisory Technology* (Suptech) dan *Regulatory Technology* (Regtech). Dua teknologi ini merupakan teknologi antisipasi pelanggaran pada industri *fintech* dengan memanfaatkan teknologi seperti basis data atau *data base*, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* hingga *blockchain*.

### UMKM

Melansir dari ASEAN Investment Report yang dirilis September 2022, jumlah UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai sekitar 65,46 juta unit. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. di 2021 juga, UMKM Indonesia tercatat mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta berkontribusi 14,4% terhadap ekspor nasional.

# Terlalu Tinggi, NIM Perbankan akan Dikaji

**M**argin bunga bersih atau *net interest margin* (NIM) dari perbankan nasional yang tinggi menyita perhatian berbagai pihak di awal tahun ini. NIM adalah rasio pendapatan bunga bersih antara bunga pendapatan bank dan bunga yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Berdasarkan data OJK pada Desember 2022, NIM perbankan nasional menyentuh angka 4,7%. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, 4,51%.

NIM menjadi penting karena bertujuan menilai kemampuan bank dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan suku bunga. Angka NIM tinggi dikhawatirkan akan memberatkan pihak lain yang membutuhkan layanan dari bank, salah satunya layanan kredit.

Angka NIM perbankan nasional yang tinggi menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, Senin, (6/2).

"Sebelum masuk ke sini saya tanya Ketua OJK, NIM-nya berapa? Di jawab Pak Ketua OJK 4,4%, tinggi banget," kata Presiden Jokowi ketika membuka acara yang digelar di Jakarta tersebut.

Ucapan Presiden Jokowi sontak membuat perhatian pada tingginya NIM perbankan. Tingginya NIM perbankan dikhawatirkan akan memberatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut yang menjadi perhatian dari Presiden Jokowi.

UMKM merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Oktober 2022,

kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2022 mencapai 60,5%. UMKM juga menyerap hingga 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Fakta tersebut membuat keberpihakan pada UMKM harus terus ditingkatkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan sentilan Presiden Jokowi, serta beberapa pihak lain tentang NIM

Ada beberapa hal yang akan segera dilakukan, salah satunya melakukan konsolidasi pada sektor keuangan. Bank akan diminta menunjukkan komponen apa saja yang menyebabkan tingginya NIM.

perbankan menandakan memang ada kekhawatiran terkait tingkat suku bunga bank. Salah satunya kekhawatiran kondisi tersebut dapat berdampak pada UMKM. OJK menyatakan akan segera melakukan kajian dan analisis mendalam terkait dengan tingginya NIM perbankan tersebut.

"Ada *concern* agar jangan sampai tingkat suku bunga tinggi menghambat bisnis, jadi (kredit dari

bank) tidak membantu sektor tertentu seperti UMKM," ujar Dian, dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023.

Dian mengatakan berbagai langkah strategis akan dilakukan untuk bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Mereka akan mengkaji faktor-faktor penyusunnya untuk bisa memastikan level ideal tingkat suku bunga atau margin yang bisa didapatkan bank, antara dana simpanan dan dana pinjaman.

"Apalagi, dalam *omnibus law* keuangan yang telah disahkan, ada amanat untuk melakukan transparansi bunga bank," ujar Dian.

Menurut Dian, NIM yang tinggi dapat terjadi karena berbagai faktor.

Mulai dari efisiensi perbankan, *high cost economy*, beban regulasi, dan lain-lain. Selain itu, menurut Dian, perbankan belum bereaksi terhadap kenaikan bunga acuan dari Bank Indonesia (BI) akhir-akhir ini.

"Apa yang menjadi konsen presiden telah kita tangkap. Ini akan kita perdalam ke depan. Untuk menjadikan sistem perbankan berfungsi dengan baik, kita harus membaca keseimbangan antara kebutuhan bank dan nasabahnya," kata Dian.

Dian mengatakan isu tingginya NIM akan benar-benar diperhatikan oleh OJK, dengan begitu sistem perbankan bisa berfungsi dengan baik secara menyeluruh. Ada beberapa hal yang akan segera dilakukan, salah satunya konsolidasi sektor keuangan. Bank diminta menunjukkan komponen yang menyebabkan tingginya NIM.

## Pintar Memanfaatkan Bunga

Naik turunnya bunga perbankan adalah sebuah keniscayaan. Kondisi ekonomi makro jadi pertimbangan apakah bunga bank akan bertahan, naik, atau turun. Bank Indonesia pasti memiliki pertimbangan matang dalam menentukan suku bunga acuan.

Konsumen harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai suku bunga bank dan bagaimana cara memanfaatkannya. Saat naik, maupun turun, konsumen bisa memanfaatkan suku bunga bank untuk dirinya.

Ketika suku bunga turun, konsumen bisa memanfaatkannya untuk mengajukan kredit. Sebab, cicilan bisa lebih ringan saat suku bunga bank turun. Sementara bila suku bunga naik, konsumen bisa meningkatkan jumlah saldo di tabungan maupun deposito. Di saat bunga naik otomatis keuntungan dari bunga atau bagi hasil juga meningkat.

Jadi, apa pun kondisi suku bunga, baik naik maupun turun, konsumen tetap bisa mengambil keuntungan atas kondisi tersebut. Ayo manfaatkan dengan bijak.

## Tertinggi di Dunia?

NIM Indonesia disebut tertinggi di ASEAN bahkan dunia.

Bagaimana faktanya, benarkah NIM Indonesia memang paling tinggi di ASEAN dan dunia?

Melansir dari data yang dirilis lembaga riset ekonomi global, *The Global Economy*, di tahun 2021, NIM perbankan Indonesia berada di peringkat 31 di tingkat global. Angkanya sebesar 5,06%. Zimbabwe mengisi posisi pertama dengan NIM tertinggi di dunia dengan angka NIM mencapai 12,83%.

Di tingkat ASEAN, NIM perbankan Indonesia tahun 2021 berada di posisi kedua tertinggi. Posisi pertama diisi Kamboja dengan angka NIM sebesar 5,35%.

Data Besar NIM Negara ASEAN hingga akhir 2021

Negara	NIM	Rank	Tahun
Cambodia	5.35	1	2003 - 2021
Indonesia	5.06	2	2000 - 2021
Philippines	3.56	3	2003 - 2021
Vietnam	3.35	4	2000 - 2021
Thailand	2.48	5	2000 - 2021
Malaysia	1.96	6	2000 - 2021
Singapore	1.21	7	2000 - 2021
Burma	1.09	8	2012 - 2021
Laos	0.77	9	2009 - 2021

Data 10 Peringkat Teratas NIM Global hingga akhir 2021

Negara	NIM	Rank	Tahun
Zimbabwe	12.83	1	2001 - 2021
Tajikistan	12.57	2	2006 - 2021
Argentina	10.44	3	2000 - 2021
Uganda	9.68	4	2000 - 2021
Rwanda	9.51	5	2002 - 2021
Mozambique	9.43	6	2000 - 2021
Zambia	9.42	7	2000 - 2021
Ghana	9.35	8	2006 - 2021
Liberia	8.15	9	2015 - 2021
Tanzania	8.04	10	2005 - 2021

# Mengenal Berbagai Program Edukasi dan Literasi Keuangan OJK

OJK masih akan terus berupaya meningkatkan program edukasi, literasi, dan perlindungan konsumen pada arah kebijakan prioritasnya di 2023.

**F**okus ini masih terus ditegaskan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas keuangan. Berkaca dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, OJK optimis bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan bisa mencapai 90% di 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen

OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa rasa optimis ini terus terjaga karena hasil dari SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Literasi keuangan tahun 2022 menjadi 49,68% dan inklusi keuangan di angka 85,10%.

"Perluasan akses keuangan di masyarakat akan membantu memperkuat perekonomian nasional," kata perempuan yang biasa disapa

Kiki Widyasari ini.

OJK juga telah menetapkan arah strategis dan fokusnya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia di 2023. Arah strategis tersebut berupa: Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis bersama dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa,



serta Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Sasaran prioritas literasi keuangan di 2023 pun bertambah lebar. Mulai dari pelajar/santri, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan pada 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah pedesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.

Kala menggelar Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Senin, 27 Februari 2023 yang dilakukan dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa setidaknya, ada tiga poin yang akan terus disosialisasikan terkait inklusi dan literasi keuangan.

Sosialisasi tersebut terdiri dari program desaku cakup keuangan, Sakinah (Santri Cakup Literasi Keuangan Syariah), dan perempuan dalam inklusi dan literasi keuangan. Program ini akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan organisasi terkait lainnya.

## Program-program Unggulan

Salah satu program unggulan yang diusung OJK adalah *Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI)* di Wilayah Pedesaan. Melalui GM EKI, OJK ingin mendorong terwujudnya ekosistem keuangan inklusif bagi masyarakat desa dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di

**OJK berkomitmen akan melakukan upaya yang optimal terhadap kredit/pembiayaan usaha produktif di wilayah pedesaan kepada UMKM ataupun masyarakat desa.**

daerah melalui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Implementasi program ini nantinya akan disesuaikan berdasarkan karakteristik di masing-masing desa.

Melalui program ini, OJK berkomitmen akan melakukan upaya yang optimal terhadap kredit/pembiayaan usaha produktif di wilayah pedesaan kepada UMKM ataupun masyarakat desa. Upaya ini juga akan berkolaborasi dengan

Lembaga Jasa Keuangan formal dan pemangku kepentingan terkait. Bagi penyandang disabilitas, OJK membuat sebuah program khusus dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dengan menggunakan bahasa isyarat agar literasi dan edukasi keuangan bisa berjalan inklusif.

Saat ini OJK telah memiliki berbagai infrastruktur literasi keuangan, diantaranya adalah Strategi Nasional Literasi Keuangan

Indonesia (SNLKI) 2021-2025, *Learning Management System (LMS)* Edukasi Keuangan dan Buku Saku Literasi Keuangan Bagi Calon Pengantin.

SNLKI 2021-2025 merupakan panduan untuk arah strategi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. SNLKI memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan tinggi, sehingga masyarakat

dapat memilih dan memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan sesuai kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan.

Sedangkan *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU) adalah sistem yang dirancang untuk masyarakat sebagai bahan edukasi agar masyarakat memahami produk dan jasa keuangan lebih dalam. LMSKU diyakini mampu menjawab tantangan demografis dan geografis dalam menjalankan strategi pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan yang dihadapi oleh Indonesia. Pengembangan LMSKU ini dipercaya menjadi suatu sarana baru bagi pelaksanaan edukasi dalam bentuk digitalisasi literasi dan edukasi keuangan.

Materi edukasi LMSKU disusun dalam bentuk video yang bisa diakses melalui situs [lmsku.ojk.go.id](https://lmsku.ojk.go.id). Terakhir, karena keuangan menjadi alasan terbesar terjadinya perceraian di Indonesia. OJK pun berupaya untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin melalui buku panduan yang mampu menjadi bahan referensi calon pengantin baru dalam melakukan perencanaan keuangan rumah tangganya.

"Saat ini, Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi berupa *minisite* dan aplikasi telah memublikasikan lebih dari 33 konten video dengan jumlah pengunjung lebih dari 220.657 penonton. Jumlah ini masih akan terus bertambah," tutur Friderica.

Terkait perlindungan konsumen, melansir keterangan resmi OJK, 7 Juli 2022, OJK telah menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai implementasi penguatan pengawasan *market conduct* (perilaku

**Salah satu tindakan terbaru yang berhasil dilakukan oleh SWI adalah menghentikan 10 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin serta menindaklanjuti temuan 50 platform pinjaman online (pinjol) ilegal pada Januari 2023.**

pasar) yaitu Peraturan OJK No.6 Tahun 2022 (POJK No.6/2022). Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan regulasi yang mengikat para pelaku jasa keuangan, diantaranya melalui kewajiban perancangan/pengujian produk dan layanan keuangan untuk menilai potensi risiko kepada konsumen, serta pelaksanaan tahapan *product life cycle* sebelum suatu produk dan layanan keuangan diluncurkan kepada masyarakat.



Peraturan ini diyakini mampu menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan *cost and benefit analysis*-nya. Harapannya, di masa depan, jumlah pengaduan masyarakat atas produk dan layanan keuangan dapat berangsur-angsur menurun seiring dengan implementasi peraturan OJK tersebut.

Objek dalam pengawasan *market conduct* di sektor keuangan tersebut meliputi perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam melakukan perancangan, menyusun dan menyampaikan informasi, melakukan penawaran atas produk dan/atau layanan di sektor keuangan, membuat perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan di sektor keuangan, dan melakukan penanganan pengaduan

Guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat, OJK akan melakukan akselerasi pada proses gugatan perdata yang berkolaborasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan untuk pemberantasan pinjaman *online* ilegal dan investasi ilegal, OJK bersama seluruh anggota Satuan tugas (Satgas) Waspada Investasi (SWI) dari 12 Kementerian/Lembaga akan berkolaborasi untuk melakukan penanganan terhadap investasi dan pinjaman *online* ilegal. Salah satu tindakan terbaru yang berhasil dilakukan oleh SWI adalah melakukan penawaran investasi tanpa izin serta menindaklanjuti temuan 50 platform pinjaman *online* (pinjol) ilegal pada Januari 2023.

Selanjutnya, OJK akan melakukan penguatan SWI baik secara kelembagaan maupun infrastrukturnya dengan rencana membuka posko pengaduan investasi ilegal dan pinjol ilegal di setiap Kantor Regional/Kantor OJK yang akan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi terkait waspada investasi ilegal dan



penanganannya juga dilakukan dalam rangka memberi pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat agar dapat terhindar dari jebakan investasi, pinjaman *online*, dan gadai ilegal.

### Mengenal Pentingnya Literasi dan Edukasi Keuangan

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang sudah dirilis secara resmi oleh OJK, indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 49,68% dan 85,10% secara berurutan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan hasil SNLIK tahun 2019, dengan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Mengapa literasi keuangan begitu penting? Karena masyarakat yang cerdas secara finansial terbukti memahami perencanaan keuangan dalam mengambil keputusan keuangan.

**Merujuk pada Laporan *Global Findex 2021* dari World Bank, konsumen atau pengguna produk keuangan yang kurang paham terkait finansial cenderung tidak dapat memanfaatkan produk keuangan secara optimal, bahkan sulit menghindari risiko produk keuangan yang mungkin terjadi.**

Merujuk pada Laporan *Global Findex 2021* dari World Bank, konsumen atau pengguna produk keuangan yang kurang paham terkait finansial cenderung tidak dapat memanfaatkan produk keuangan secara optimal, bahkan sulit menghindari risiko produk keuangan yang mungkin terjadi. Sederhananya, bila seorang konsumen mengajukan kredit kendaraan bermotor dan tidak memiliki literasi keuangan yang baik, maka potensi risiko mengalami kerugian pun akan menjadi besar karena tidak paham jika telat

melakukan pembayaran akan dikenakan biaya dan denda kredit.

Padahal, bila memiliki literasi keuangan yang baik, konsumen akan paham bahwa kredit bisa membantu konsumen memiliki kendaraan yang menunjang produktivitas dalam bekerja. Pentingnya edukasi dan literasi keuangan ini telah menjadi fokus OJK sejak 11 tahun lalu. Tujuannya hanya satu, agar masyarakat lebih sadar akan produk keuangan yang mereka gunakan dan terhindar dari berbagai macam bentuk kerugian.

# Waspada Saham Gorengan! Belajar dari Kasus Adani Group

Dugaan skandal Adani Group di India patut menjadi alarm bagi industri jasa keuangan, terutama bagi investor.

**K**elompok perusahaan multinasional milik Gautam Adani tersebut, dituduh melakukan *fraud* dan manipulasi pasar.

Sebelumnya, Adani Group giat melakukan akuisisi dan ekspansi bisnis di masa pandemi Covid-19. Alhasil nilai saham perusahaan meroket sehingga mengantar Gautam Adani menjadi orang terkaya di India dan Asia dengan nilai kekayaan \$ 280 miliar per November 2022.

Petaka muncul saat Hindenburg Research, perusahaan riset asal Amerika Serikat yang mengungkap 'penggorengan' saham Adani Group di lantai bursa. Akibat tuduhan Hindenburgh tersebut, harga saham perusahaan unggulan Adani Group anjlok 55%, bahkan ada satu perusahaan yang turun hingga 71%.

Dugaan skandal ini pun menjadi isu nasional. Pemerintah dan regulator keuangan India turun tangan menyusul kekhawatiran dampak skandal tersebut dapat merembet pada perekonomian India dan memengaruhi sentimen investor global terhadap negara tersebut.

Isu ini juga menjadi perhatian pemimpin dunia, termasuk Presiden Jokowi yang memberikan sorotan. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, baik berupa asuransi, pinjaman *online*, maupun investasi.

"Adani langsung kehilangan 120 miliar dollar AS, jika dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai



ini. Pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan," ujar Jokowi saat acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2).

Menanggapi kejadian ini, Anggota Dewan Komisiner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widayarsi Dewi mengatakan, penguatan pengawasan terhadap perilaku usaha jasa keuangan atau *market conduct* ini

penting supaya menjaga stabilitas industri jasa keuangan.

Friderica mengingatkan bahwa permasalahan yang terjadi pada Adani disebabkan pelanggaran terhadap *market conduct*, di mana Indonesia juga masih rentan terhadap permasalahan ini. Hal ini terlihat dari besarnya gap antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan, meskipun tingkat persentase keduanya terus meningkat tiap tahun hingga kini masing-masing 49,7% dan 85,1%.

Friderica berpegang pada

"Bursa akan mengenakan ARA (*Auto Rejection Atas*) dan ARB (*Auto Rejection Bawah*) atas order saham yang mencapai level harga tertentu,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan tentang kewenangan *market conduct* yang mencakup literasi dan inklusi keuangan, pengawasan perilaku pelaku usaha sektor keuangan, penanganan pengaduan, hingga pemberantasan penipuan investasi.

Sanksi tegas akan dijatuhkan bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar. Untuk sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha, serta Pasal 306 terkait sanksi pidana yang ancamannya 2-10 tahun penjara dan pidana denda Rp25-250 miliar.

Tak kurang, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) pun menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk melindungi investor. Langkah nyata diterapkan dengan memberikan notasi khusus terhadap saham-saham yang bergerak tidak wajar.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Sihar Manullang menyatakan, bursa akan memantau ketat saham-saham yang memiliki catatan khusus terkait fundamental dan volatilitas harga.

"Bursa akan mengenakan ARA (*Auto Rejection Atas*) dan ARB (*Auto Rejection Bawah*) atas order saham yang mencapai level harga tertentu," tegas Kristian.

Saat saham menyentuh ARA atau ARB, sistem bursa akan menolak secara otomatis order jual atau beli yang masuk. Penerapan ini untuk memastikan perdagangan saham berjalan dalam kondisi wajar.

## GLOSARIUM

• **Fraud:** Perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu.

• **Volatilitas:** Ukuran perubahan statistik suatu harga saham dalam periode tertentu.

• **Analisis Fundamental:** Pengukuran dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan.

• **Unusual Market Activity (UMA):** Pergerakan harga saham yang dianggap tidak biasa atau tidak wajar.

• **Auto Rejection Atas (ARA):** Pembatasan kenaikan harga saham dalam satu hari.

• **Auto Rejection Bawah (ARB):** Pembatasan penurunan harga saham dalam satu hari.

## Tips agar tidak terjebak rayuan saham gorengan

### 1. Lakukan riset mendalam.

Lakukan analisis fundamental saham dengan melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut atau dari nilai valuasinya.

### 2. Perhatikan volume dan nilai transaksi harian.

Amati pergerakan volume dan nilai transaksi harian saham tersebut. Hindari saham yang telah "tidur" cukup lama, tetapi melonjak tiba-tiba dalam beberapa hari.

### 3. Perhatikan Unusual Market Activity (UMA).

Jika saham harian bergerak naik hingga 20-35% per hari, itu adalah sinyal ketidakwajaran. Mungkin saja sedang digoreng oleh oknum.

### 4. Diversifikasi portofolio.

Beli saham pada perusahaan, sektor, serta lokasi geografis yang beragam. Ini dapat membantu mengurangi paparan terhadap risiko yang terkait dengan satu perusahaan atau industri.

### 5. Terus monitor.

Awasi terus investasi Anda dan tetap *up-to-date* dengan berita dan perkembangan yang terkait dengan perusahaan tempat Anda menaruh saham.

### 6. Pilih saham perusahaan bereputasi tinggi.

Pertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan yang mematuhi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

### 7. Cari nasihat profesional.

Minta pendapat dari penasihat keuangan atau manajer investasi untuk mengurangi potensi risiko dan membuat keputusan investasi yang tepat.

\*DARI BERBAGAI SUMBER

# Menatap Industri Keuangan Non-Bank di Tahun Kelinci Air

Dalam sistem kalender China, tahun 2023 terhitung sebagai tahun Kelinci Air. Tahun Kelinci Air datang sekali dalam siklus 60 tahun. Yang tak lepas dari pergantian tahun dalam penanggalan China adalah perihal rezeki dan kondisi ekonomi.

Menurut pakar *feng shui* Suhu Xiang Yi, kejelian akan menjadi kunci kesuksesan dalam memilih investasi. Meski begitu, Suhu Xiang Yi memberikan bocoran bahwa transportasi, pertambangan, dan teknologi akan menjadi sektor yang bakal bersinar di tahun 2023.

Ada beberapa instrumen investasi sebenarnya yang bisa menjadi pilihan konsumen selain perbankan. Misalnya pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Serta sebaliknya jika membutuhkan modal maka bisa melalui pembiayaan bahkan dapat melalui *financial technology* (*fintech*). Industri jasa keuangan yang mendukung kegiatan ini kemudian dikenal dengan nama Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Perkembangan IKNB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

**Tingginya permodalan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan memberikan bantalan yang memadai untuk menyerap risiko dan menunjang kebutuhan penyaluran pembiayaan.**

Indonesia di tahun 2023 memegang peran penting. Kinerja IKNB berdasar data OJK pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada tanggal 6 Februari 2023 menunjukkan hal yang positif. Hal positif ini dapat dilihat dari acuan masing-masing sektor di dalam IKNB tersebut yang menunjukkan kinerja yang baik.

Industri asuransi misalnya, hasil positif ini dapat terlihat dari premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 13,9% mencapai Rp119 triliun. Namun, premi asuransi jiwa di tahun 2022 mengalami kontraksi 7,8%. Kondisi ini merupakan efek dari beberapa potret permasalahan asuransi yang terjadi di tahun 2020-

2022 yang lalu.

Tingginya permodalan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan memberikan bantalan yang memadai untuk menyerap risiko dan menunjang kebutuhan penyaluran pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan *Risk Based Capital Industry* asuransi umum dan jiwa masing-masing sebesar Rp 327%

dan 484,2%. Jauh di atas yang ditetapkan oleh OJK yaitu 120%. Pada pembiayaan *gearing* rasio menunjukkan 2,1 kali, jauh di bawah yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 10 kali.

Tetapi ada beberapa hal yang perlu dicermati pada industri ini. Karena masih banyak aduan dan pertanyaan yang di sampaikan kepada OJK. OJK selama bulan Januari-Februari 2023 telah menerima sebanyak 184 aduan dan 1.115 pertanyaan yang terkait dengan kesulitan klaim, produk tidak sesuai saat penawaran, persoalan premi asuransi, persoalan isi polis yang tidak diketahui dan dipahami konsumen serta pembatalan atau penutupan polis. Legalitas produk dan LJK, serta persoalan premi asuransi.

Instrumen berikutnya yaitu piutang pembiayaan. Perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 13% sampai dengan 15% sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat setelah tidak ada pembatasan pergerakan. NPF perusahaan pembiayaan yang tercatat di OJK pada tahun 2022 yang lalu adalah sebesar 2,32%, dimana batas maksimal adalah 5%.

Di sisi lain piutang pembiayaan menduduki tempat pertama di dalam pengaduan oleh konsumen ke OJK. Tercatat 615 aduan yang topiknya terkait dengan restrukturisasi pembiayaan/pinjaman, perilaku petugas penagihan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sanggahan transaksi serta permasalahan agunan.

Untuk pertumbuhan *financial technology* (*fintech*) tahun 2023 sepertinya akan terus naik dari sisi *outstanding* pinjaman. Dimungkinkan

hal ini terjadi dari dukungan generasi Z yang memiliki kemampuan literasi teknologi yang cukup baik dan anti ribet. Hal yang baik juga terlihat dari risiko atas profil *fintech* berupa jumlah kejadian wanprestasi yang masih di bawah 5%.

Meskipun terlihat menarik dari sisi industrinya tetapi konsumen tetap perlu berhati-hati. Karena *fintech* menduduki tempat kedua untuk pengaduan konsumen kepada OJK, yakni sebesar 537 aduan.

Aset dana pensiun juga tumbuh 5% sd 7%. Hal ini menunjukkan arah bahwa dana pensiun masih merupakan salah satu bentuk investasi masa depan yang masih menjadi pilihan bagi masyarakat yang merencanakan hari tua yang lebih stabil dalam sisi keuangan.

Dari keseluruhan informasi di atas, konsumen dapat mempertimbangkan untuk menggunakan produk IKNB di tahun kelinci air ini. Fundamental ekonomi Indonesia masih terlihat

kuat, kondisi emiten yang terus meningkat. Di samping itu pemerintah dalam hal ini OJK, Kemenkeu, Bank Indonesia serta Lembaga Penjamin Simpanan saling bersinergi dalam UU baru tentang sektor keuangan untuk menguatkan regulasi yang telah ada sebelumnya.

OJK sendiri dalam rangka melakukan perlindungan terhadap konsumen melakukan beberapa hal positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan sektor jasa industri keuangan khususnya IKNB. Adapun yang dilakukan OJK adalah penyelesaian pengaduan konsumen, penindakan atas investasi ilegal untuk mencegah kerugian di masyarakat serta penerapan sanksi.



# Prospek dan Peluang Pasar Modal Syariah

**P**erbincangan mengenai prospek di sektor keuangan syariah selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pasar modal syariah. Berbagai kalangan menyatakan optimis, karena jumlah penduduk muslim, khususnya kelas menengah muslim terus meningkat. Berdasarkan data Boston Consulting Group, jumlah kelas menengah muslim di Indonesia berjumlah 64,5 juta orang (2020).

Kelas menengah muslim tersebut sudah pasti membutuhkan pilihan produk, jasa, dan keuangan yang sesuai dengan aturan dalam agama Islam. Hal ini yang membuat prospek sektor keuangan, termasuk pasar modal syariah berpotensi makin bersinar. Di tengah kecenderungan suku bunga tinggi, pasar modal syariah menjadi alternatif investasi menarik.

Prospek pasar modal syariah terefleksi dari kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang lebih baik bahkan melampaui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Di kancah global kinerja positif pasar modal syariah Indonesia menjadi satu-satunya yang berkinerja positif pada tahun 2022.

Sepanjang tahun 2022, ISSI tumbuh 15,19% dan ditutup di level 217,73 pada perdagangan 30 Desember 2022 dibanding penutupan pada 30 Desember 2021 di level 189,02 melampaui IHSG yang hanya naik 4,09. Dari sisi kapitalisasi pasar modal syariah mencatat kenaikan 29% dalam kurun waktu 6 tahun, dari Rp 3.740 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp 4.786 triliun pada tahun 2022. Porsi nilai kapitalisasi pasar ini 49,85% dari total IHSG pada tahun 2022.



Pasar modal Indonesia secara keseluruhan akhir tahun 2022 mencetak kinerja spektakuler, dengan IHSG menembus rekor tertinggi melampaui sebelum pandemi Covid-19. Dengan rata-rata nilai transaksi harian berkisar Rp14 triliun rupiah, kapitalisasi pasar menembus Rp9.499 triliun, menjadi bursa terbesar di Kawasan ASEAN.

Dalam lima tahun terakhir pasar modal berhasil menghimpun dana sebesar Rp1.082.63 triliun yang

berasal dari penawaran umum saham dan obligasi atau sukuk. Berturut-turut sejak tahun 2018 sampai dengan 30 Desember 2022, dana yang dihimpun sebesar Rp166,06 triliun, Rp166,85 triliun, Rp118,70 triliun, Rp363,29 triliun, dan Rp267,73 triliun.

Dari sisi jumlah saham tercatat, laju pertumbuhan saham syariah juga lebih tinggi, menurut data OJK, dalam 6 tahun terakhir, jumlah saham tercatat di bursa BEI

meningkat hingga 48% menjadi 846 saham pada akhir tahun 2022, peningkatan jumlah saham non-syariah sebesar 34%. Sementara saham syariah tumbuh pesat sebesar 57% menjadi 552 saham pada akhir tahun 2022.

Imbas pandemi Covid-19 sempat menghambat kinerja pasar modal syariah. Di akhir tahun 2020, ISSI turun 5,46%, Jakarta Islamic Index (JII) turun 9,69% dibanding tahun 2019. ISSI, bahkan turun 38,24% ke

**Di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi, jumlah investor yang tercatat dalam SOTS atau Sistem Online Trading Syariah justru meningkat drastis.**

titik terendah pada 24 Maret 2020, dibanding penutupan terakhir di tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2020 ISSI ditutup pada level 177,48 atau meningkat 53% dari titik terendah. Gambaran kinerja ISSI yang resilien.

Di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi, jumlah investor yang tercatat dalam Sistem Online Trading Syariah (SOTS) justru meningkat drastis. Data OJK menyebut jumlah investor syariah meningkat tajam dari 68.599 pada tahun 2019, menjadi 117.942 investor pada akhir tahun 2022.

## Pembatasan di Pasar Modal Syariah

Kinerja pertumbuhan indeks syariah yang tinggi terutama karena dukungan fundamental konsituen emiten syariah yang dipengaruhi oleh karakter dan pembatasan aturan sesuai prinsip syariah.

Kriteria emiten yang memenuhi prinsip syariah adalah: Pertama, emiten tidak menjalankan usaha perjudian, permainan yang tergolong judi atau perdagangan terlarang; bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, bukan bank dan asuransi konvensional; bila di bidang produksi, distribusi, dan perdagangan, tidak boleh terdapat makanan, minuman yang haram atau merusak moral dan bersifat *mudharat*.

Kedua, emiten harus memenuhi rasio keuangan yang telah ditetapkan yakni: Rasio antara total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan

total aset tidak lebih dari 45% dan rasio antara total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%.

OJK telah mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang melibatkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia dalam penyusunannya pada November 2007. DES yang diperbaharui setiap 6 bulan ini menjadi syarat dan acuan bagi setiap produk berbasis saham syariah, seperti indeks ISSI, JII, *Sharia Growth*, produk reksa dana syariah. Ada juga produk berbasis syariah yang non saham seperti sukuk negara dan sukuk korporasi.

## Literasi Keuangan Nasional

Hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan Indeks Literasi pasar modal syariah sebesar 0,87% dan Indeks Inklusi pasar modal syariah sebesar 0,50%.

Hasil itu menunjukkan baru sebagian kecil masyarakat yang teredukasi dan memanfaatkan produk investasi, termasuk investasi syariah. Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat besar di masa depan, termasuk di pasar modal syariah.

Edukasi yang dilakukan oleh OJK secara berkelanjutan pasti akan berdampak positif terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Di masa depan, hal ini akan turut membantu meningkatkan prospek dan peluang pasar modal syariah di Indonesia.



## WASPADA SNIFFING

# Modus Penipuan Online untuk Menguras Rekening

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan internet tidak bisa dilepaskan dari aktivitas sehari-hari. Internet mempermudah aktivitas kita, mulai dari bekerja, mencari informasi, hingga bertransaksi.

Sayangnya, berbagai kemudahan tersebut juga dibarengi dengan adanya risiko kejahatan digital. Ada berbagai jenis kejahatan digital, salah satunya adalah *sniffing* yang belakangan ini marak terjadi.

*Sniffing* adalah tindak kejahatan penyadapan oleh *hacker* yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mencuri data dan informasi penting seperti *username* dan *password mobile banking (m-banking)*, informasi kartu kredit, *password email*, dan data penting lainnya.

Aksi ini dilakukan dengan mengirimkan pesan *chat* meminta korban mengunduh lampiran, yang dimanipulasi dengan memberikan nama foto. File tersebut bukanlah file foto, melainkan file berekstensi APK berjenis RAT (*Remote Administrator Tool*) yang perlu diinstal pada ponsel korban. Apabila korban mengunduh, lalu membuka file tersebut, otomatis langsung melakukan instalasi dan memulai *sniffing*.

Hanya butuh waktu sekitar 40-60 menit bagi pelaku untuk mengakses dan memiliki kontrol penuh pada ponsel korban. Setelah mencuri data-data penting, pelaku dapat dengan mudahnya menguras habis rekening korban melalui informasi tersebut. Selain itu, pelaku juga bisa mengontrol ponsel korban dari jarak jauh.



## Beragam modus *sniffing*

Penipuan jenis ini sering sekali mengincar para pengguna *platform* komunikasi WhatsApp dengan modus yang beragam. Berikut ini sejumlah modus penipuan *sniffing* yang belakangan ini terjadi dan harus diwaspadai oleh masyarakat:

### Modus kurir mengirim foto paket

Pada penghujung 2022 lalu, muncul modus penipuan dengan mengaku sebagai kurir jasa ekspedisi. Pelaku berpura-pura menjadi kurir paket dan memberikan informasi palsu melalui pesan WhatsApp, yakni mengirimkan foto paket berekstensi APK untuk dibuka oleh korban. *File* yang dimanipulasi dengan nama "Lihat foto paket" tersebut adalah APK (aplikasi) berbahaya.

### Modus undangan pernikahan digital

Setelah modus kiriman foto paket sudah banyak diketahui publik, muncul

modus baru dengan mengirim undangan pernikahan digital. Pelaku mengirim undangan pernikahan digital melalui WhatsApp. Alih-alih menampilkan rincian undangan, pelaku memberikan file dengan nama "undangan" berekstensi APK dan sudah beberapa kali memakan korban. Rekening orang yang membuka file tersebut akhirnya dikuras pelaku penipuan.

### Modus tagihan PLN

Di awal tahun 2023 ini, penipuan dengan modus mengatasnamakan petugas PLN yang mengirim pesan melalui WhatsApp juga marak terjadi. Pelaku mengatasnamakan petugas PLN dan meminta penerima pesan untuk mengecek tagihan listrik lewat *file* APK yang dikirimkan.

### Modus tagihan BPJS Kesehatan

Teranyar adalah modus tagihan pembayaran BPJS Kesehatan. Pelaku yang mengatasnamakan BPJS

Perlu diingat, keamanan data pribadi bergantung dengan seberapa besar tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan pada perangkat maupun akun-akun yang digunakan.

Kesehatan meminta segera melakukan pembayaran. Dalam pesan tersebut juga dicantumkan nama korban serta besaran tagihan, kemudian ada *file* yang diberi nama "LEMBAR TAGIHAN Instal.apk".

### Bagaimana bila terlanjur membuka *file*?

Bagi Anda yang sudah terlanjur mengklik pesan dengan ekstensi APK, apakah hanya bisa pasrah? Sebenarnya masih ada kesempatan untuk mengamankan ponsel dari pembajakan pelaku *sniffing*.

Pertama, matikan *mobile data* atau *wifi*. Kedua, hapus *mobile banking*. Ketiga, format ponsel ke setelan pabrik. Keempat, segera hubungi *call center* bank terkait untuk blokir rekening, lalu ganti PIN dan *password*. Bila cara ini dilakukan dengan segera, rekening masih bisa diselamatkan. Namun, cara ini harus dilakukan segera dan tidak boleh ditunda.

Masyarakat juga disarankan untuk langsung mengganti semua *password*

di setiap akun, terutama aplikasi perbankan atau uang elektronik, serta tambahkan paramater keamanan seperti *Two Factor Authentication (2FA)*.

Perlu diingat, keamanan data pribadi bergantung dengan seberapa besar tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan pada perangkat maupun akun-akun yang digunakan. Selain itu, literasi digital juga perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa waspada dan terhindar dari ragam modus penipuan *online* yang marak terjadi di dunia digital.

Kemampuan literasi digital bermanfaat untuk mengenali berbagai jenis penipuan yang biasa dilakukan dengan model *social engineering* seperti *sniffing* yang marak terjadi belakangan ini. Jadi, jaga data pribadimu, lindungi keuanganmu.

## Tips menghindari *sniffing*

1. **Jangan sembarang unduh aplikasi** atau membuka tautan yang dikirim melalui SMS/WhatsApp/Email. Pastikan hanya mengklik tautan dari sumber resmi, termasuk nomor telepon dan email resmi.

2. **Cek keaslian telepon/SMS/WhatsApp** yang menghubungi ke *call center* resmi perusahaan.

3. **Hanya unduh aplikasi resmi** dari sumber resmi (*website* resmi perusahaan, App Store, Play Store). Karena aplikasi yang diunduh secara ilegal, tidak ada jaminan keamanan yang diberikan.

4. **Aktifkan notifikasi transaksi rekening**. Hal ini bertujuan agar jika ada pencurian segera bisa ditanggulangi.

5. **Selalu cek riwayat rekening secara berkala**. Jika terindikasi ada transaksi yang mencurigakan segera lakukan pemblokiran rekening.

6. **Lakukan pergantian *password* secara berkala**. Jangan pernah memberikan *password* Anda kepada pihak lain untuk mengakses akun yang Anda miliki.

### 7. **Jangan gunakan *Wi-Fi* publik untuk bertransaksi keuangan**

Berhati-hatilah menggunakan jaringan internet pada fasilitas *Wi-Fi* publik untuk bertransaksi keuangan atau membuka akun-akun pribadi. Pilihlah *Wi-Fi* yang dilengkapi fasilitas keamanan, atau lebih baik Anda menggunakan jaringan internet pribadi.

# Ekonomi Dunia Melambat, Indonesia Optimis Melesat

Perang antara Rusia dengan Ukraina, belum nampak tanda-tanda terhenti. Dunia semakin khawatir akan menekan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Adakah tekanan ini juga berimbas ke Indonesia?



**K**ekhawatiran resesi dilontarkan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Antonio Guterres dalam buku laporan tahunan PBB di awal tahun 2023 lalu. Guterres menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami penurunan secara signifikan menjadi 1,9% tahun ini. Selain tekanan akibat perang, juga dampak dari pandemi Covid-19.

“Perlambatan ekonomi global yang luas dan berat semakin tertekan dengan tingginya inflasi, pengetatan moneter yang agresif, dan meningkatnya ketidakpastian,” tulis Guterres.

Laporan tersebut mengatakan perkiraan pertumbuhan ekonomi

1,9% tahun ini tak sesuai dengan apa yang diperkirakan pada tahun 2022 sebesar 3%. Penurunan ini menjadi angka terendah dalam beberapa dekade terakhir. Walau demikian, harapan akan kembali tumbuh diprediksi akan terjadi pada tahun 2024 nanti menjadi 2,7%. Tetapi dengan syarat, jika inflasi secara bertahap dapat dikendalikan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2023 menyatakan sudah menyiapkan mitigasi yang tepat. Ada tiga prioritas kebijakan yang diyakini dapat bertahan dari adanya tekanan perlambatan ekonomi global.

Mahendra menjelaskan kebijakan pertama adalah penguatan sektor jasa keuangan. Di sektor perbankan difokuskan pada penguatan permodalan dan konsolidasi. Selain itu juga penguatan tata kelola industri, meningkatkan efisiensi perbankan, dan penguatan inovasi pada produk dan layanan perbankan. Sementara untuk pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), OJK berfokus pada peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas terkait pengelolaan investasi.

“Bagi industri perasuransian, upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Itu melalui penyelesaian asuransi dan produk asuransi yang bermasalah, penerapan PSAK 74, penguatan fungsi aktuaris, dan penataan pemasaran produk asuransi,” jelas dia dalam konferensi pers secara virtual.

Prioritas kebijakan kedua, untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, OJK akan mendorong optimalisasi berbagai sumber pendanaan. Sebagai contoh adalah dengan meningkatkan investor pada instrumen investasi syariah maupun investasi berkelanjutan.

Kemudian prioritas ketiga, yaitu OJK akan meningkatkan Layanan dan Penguatan Kapasitas OJK sebagai tanggapan atas berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah industri keuangan dan masyarakat. OJK akan memperluas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sehingga

memberikan ruang yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan.

Cara ini diharapkan dapat, mempercepat implementasi perizinan *single window* serta memberikan layanan perizinan yang lebih cepat dan terintegrasi, memfasilitasi koordinasi industri jasa keuangan dengan otoritas dan lembaga lain untuk menghindari duplikasi tindakan, kesetaraan standar dan perlakuan, serta memberikan kepastian hukum.

tahunan dimulai. Belajar dari periode lalu, aktivitas industri akan meningkat khususnya tekstil, percetakan, serta transportasi. Sekali pun suhu di tahun politik meningkat namun kondisi iklim berusaha tetap terjaga dengan baik,” ujar Mahendra.

## Pilhan investasi

Melihat fakta di atas, kondisi konsumen jasa ekonomi tidak perlu terlalu khawatir dengan perekonomian

Pengalaman menunjukkan sekalipun suhu politik meningkat, namun kondisi keamanan, kepastian hukum, dan iklim berusaha tetap terjaga dengan baik.

## Tahun Politik

Optimisme terhadap tetap terjaganya pertumbuhan ekonomi dan pasar keuangan di Indonesia juga disuarakan Mahendra Siregar. Ia menyebut, tahun 2023-2024 merupakan tahun politik di Indonesia. Selama ini, demokrasi yang berjalan di Indonesia, diyakini sudah pada taraf yang matang. Pemilihan umum dan pemilihan presiden serta wakil presiden secara langsung, pada tahun mendatang sudah memasuki periode ke-5. Pengalaman menunjukkan sekalipun suhu politik meningkat, namun kondisi keamanan, kepastian hukum, dan iklim berusaha tetap terjaga dengan baik.

“Tahun ini siklus politik lima

nasional. Sektor konsumsi akan terus menggeliat dan itu akan menghidupkan perekonomian nasional. Masyarakat tak perlu terlalu merisaukan perekonomian baik makro, maupun mikro.

Optimisme yang disampaikan oleh berbagai pihak ini sebaiknya ditanggapi juga oleh konsumen jasa keuangan secara bijak. Tak perlu terlalu khawatir dalam memanfaatkan berbagai instrumen keuangan. Tak perlu takut juga untuk berinvestasi. Agar investasi tetap aman dan terjaga, bisa dicoba dengan memilih beberapa jenis investasi. Jangan hanya menaruh “telur” di satu keranjang saja. Agar dana tetap terjamin.

## Antara Optimisme dan Kewaspadaan

Berbagai indikator, baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi Indonesia ke depan berada di level yang baik. Hal ini tercermin dari neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut dan rasio utang luar negeri terhadap PDB masih dalam level aman.

Namun, Pemerintah tetap waspada dan antisipatif dalam menghadapi risiko ke depan, mengingat pertumbuhan global diperkirakan masih melambat di tahun 2023. Hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya perubahan iklim ekstrem, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit.

“Di tahun 2023 kita optimis ekonomi kita akan tetap tangguh di tengah-tengah risiko perlambatan global. Dengan kita mulai buka PPKM kemarin, kita harapkan mobilitas masyarakat terus meningkat,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiwono Moegiarso.

PPKM yang telah dicabut memungkinkan pertumbuhan perekonomian berlangsung lebih cepat. Di saat seperti inilah, konsumen bisa memanfaatkan kondisi untuk membiakkannya dengan berinvestasi atau menggunakannya untuk mengembangkan usaha.

Ketua Himbara, Sunarso:

## ”Siap Antisipasi Resesi dengan Empat Skenario Mitigasi”

Memasuki tahun 2023, dunia dilanda kekhawatiran akan resesi global. Hampir seluruh negara diprediksi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia? OJK mewancarai Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama BRI, Sunarso, tentang kondisi ekonomi dan kesiapan industri perbankan dalam mengendalikan inflasi serta mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Berikut petikannya:

### Berdasarkan riset beberapa lembaga, tahun 2023 dunia dihantui resesi global. Apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia?

Berbagai indeks ketidakpastian dan risiko perekonomian global mengalami peningkatan akibat tekanan inflasi, tensi geopolitik yang tinggi, dan kekhawatiran resesi. Berdasarkan survei *Bloomberg*, probabilitas resesi ekonomi tahun 2023 di banyak negara berada di atas 20%, utamanya pada negara maju seperti Uni Eropa (50%) dan AS (40%). Sedangkan, probabilitas resesi ekonomi Indonesia hanya 3%.

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia mencatatkan capaian yang impresif, tumbuh 5,31% pada tahun 2022 naik dari 3,70% pada tahun 2021. Fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih *robust* dibandingkan periode resesi sebelumnya, dan *less sensitive* terhadap gejolak eksternal. Memperhatikan situasi ekonomi tersebut dan juga survei *Bloomberg*, kami berkeyakinan Indonesia masih cukup jauh dari episentrum resesi ekonomi global.

### Bagaimana peran industri perbankan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional?

Industri perbankan dapat berperan dengan terus melakukan penyaluran kredit secara selektif dan fokus pada pertumbuhan domestik. Caranya adalah dengan mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan UMKM yang menjadi *core business* sejumlah bank, maka bank akan berperan lebih aktif lagi dalam menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia.

### Apa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia dan bagaimana Himbara mendukungnya?

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia terlihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai sekitar 62,5% dan serapan tenaga kerja sebanyak 97,2%. Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sejalan dengan peran Himbara sebagai agen penciptaan nilai dan agen pembangun-an untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya pada sektor UMKM. Sebagai contoh, pada tahun 2021 BRI Bersama dengan Pegadaian dan PNM membentuk  *Holding Ultra Mikro* sebagai bentuk

perluasan akses layanan keuangan ke segmen mikro dan ultra mikro.

Pembentukan  *Holding Ultra Mikro* juga dapat berdampak pada pemerataan akses keuangan terutama di segmen ultra mikro yang nantinya berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar kurang lebih 90% pada tahun 2024. Selain itu  *Holding Ultra Mikro* juga membantu penciptaan lapangan kerja khususnya di segmen ultra mikro yang merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

### Apa strategi khusus dari Himbara untuk menghadapi ancaman resesi global tersebut?

Mengendalikan inflasi dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi kuncinya. Kami telah memetakan kondisi perekonomian nasional melalui empat matriks yang menjadi dasar antisipasi atau mitigasi risiko.

Pertama, kondisi ekonomi pulih dengan inflasi naik dan kualitas pinjaman memburuk. Maka strateginya adalah dengan melakukan pemantauan kualitas pinjaman secara intensif, mempertahankan  *coverage ratio* yang tinggi, tumbuh secara selektif,  *enhance credit risk* model, menetapkan  *loan portfolio guideline* (LPG) yang moderat dan optimalisasi  *write-offs* untuk  *recovery rate* yang lebih tinggi.

Kedua, kondisi ekonomi mulai pulih, dengan inflasi terkendali dibarengi kualitas kredit membaik. Dengan kondisi tersebut, langkah yang dapat diambil adalah mengendurkan LPG sehingga kredit dipacu untuk tumbuh, menurunkan  *coverage ratio*, serta  *enhance risk-based pricing* model untuk meningkatkan daya saing produk.

Ketiga, kondisi ekonomi tetap stagnan, tetapi inflasi terkendali dengan kualitas kredit yang membaik. Jika kondisi ini terjadi, strateginya adalah dengan tumbuh secara selektif, menetapkan LPG yang moderat, mempertahankan  *coverage ratio* yang tinggi, serta melakukan pemantauan kualitas pinjaman secara intensif, simulasi dan  *stress-test* secara berkesinambungan.

Di tahun 2023 kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan melanjutkan tren yang positif di tahun 2022.

Keempat adalah kondisi yang paling buruk, yaitu ekonomi tetap stagnan dengan inflasi yang naik dan kualitas pinjaman memburuk. Jika kondisi itu terjadi, maka strateginya adalah tumbuh terbatas, pengaturan LPG yang sangat ketat, mempertahankan  *coverage ratio* yang tinggi, serta melakukan pemantauan kualitas pinjaman secara intensif, simulasi dan  *stress-test* secara berkesinambungan.

Memperhatikan situasi perekonomian di Indonesia, maka langkah yang paling relevan untuk dilakukan oleh perbankan adalah skenario nomor satu.

### Apakah Anda optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023?

Di tahun 2023 kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan melanjutkan tren yang positif di tahun 2022.  *Growth Domestic Product* (GDP), kami proyeksikan tumbuh positif di kisaran 4,42%-5,04% dengan kondisi inflasi yang stabil di level 3,57%-3,92% dan kurs USD/IDR yang terjaga pada level Rp15.138 - Rp15.400. Adapun aspek pendorong optimisme tersebut di antaranya peningkatan aktivitas bisnis dan ekonomi sejalan dengan pengendalian kasus Covid-19, perpanjangan relaksasi dan restrukturisasi kredit akibat Covid-19 hingga tahun 2024, dan harga komoditas yang mulai stabil.



# Undang-Undang PPSK, Perlindungan dari Investasi Bodong

Tawaran investasi baik *online* maupun *offline* semakin marak. Produknya pun bermacam-macam, mulai dari asuransi unit link, *robot trading*, koin kripto, *peer-to-peer lending*, hingga emas digital.

**T**awaran investasi baik *online* maupun *offline* semakin marak. Produknya pun bermacam-macam, mulai dari asuransi unit link, *robot trading*, koin kripto, *peer-to-peer lending*, hingga emas digital.

Iming-iming keuntungan besar tanpa banyak repot membuat banyak orang tergoda dan terburu-buru membeli produk yang ditawarkan itu. Akhirnya, bukan untung yang didapat malah uang hilang dan belum tentu kembali.

Untuk menangkap fenomena yang berkembang saat ini, DPR dan pemerintah telah bersepakat menerbitkan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) atau yang lebih dikenal dengan *Omnibus*

Law sektor keuangan (UU No.4/2023). UU tersebut memuat 27 bab dan 341 pasal yang menggantikan 17 undang-undang terkait sektor keuangan yang diantaranya telah berlaku selama 30 tahun. Beberapa hal utama yang diatur dalam undang-undang ini antara lain penguatan perlindungan dan literasi konsumen.

UU PPSK menerapkan sanksi dan denda yang lebih berat bagi pelaku usaha sektor keuangan yang berani melanggar aturan. Pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal satu triliun rupiah bisa diterapkan bagi siapapun yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari OJK. Pelaku usaha sektor keuangan juga dilarang

pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 76.19% di 2019 menjadi 85.10% di 2022. Meski demikian, akhir-akhir ini kita sering mendengar berbagai kasus penipuan yang berkedok investasi dan tidak sedikit juga masyarakat yang menjadi korban pinjaman *online* ilegal. Hal itu disebabkan kurangnya literasi keuangan atau akses pembiayaan ke perbankan.

OJK dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) akan memperkuat edukasi masyarakat dan pemberantasan pinjol ilegal, kata Tongam L. Tobing, ketua SWI. Sampai dengan 30 Desember 2022,

**Belajar dari kasus skema ponzi terbesar di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Bernard Madoff, setiap konsumen harus selalu waspada dan tidak enggan untuk bertanya serta memeriksa legalitas produk investasi yang ditawarkan kepada OJK.**

memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau informasi yang dinyatakan. Produk atau layanan yang dijual atau ditawarkan juga harus memiliki ijin. Selain itu, ada juga larangan mengenakan biaya konsumen atas layanan pengaduan.

Tidak hanya sanksi pidana, namun UU PPSK juga mengedepankan prinsip keadilan restoratif termasuk mengembalikan kerugian atau keuntungan yang tidak sah kepada korban.

## Konsumen Pintar

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia telah sedikit meningkat dari 38,03% di 2019 menjadi 49,68% tahun lalu. Artinya ada lebih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan dalam mengambil keputusan dan

OJK telah menerima 14.764 pengaduan, sebanyak 92 pengaduan diantaranya berindikasi pelanggaran sedangkan 3.018 tergolong sengketa. Hampir separuh dari pengaduan yang diterima OJK tahun lalu terkait dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Beberapa permasalahan terbesar yang sering muncul dari pengaduan masyarakat antara lain penolakan pelunasan kredit atau pembiayaan dipercepat oleh bank, kesulitan klaim asuransi, produk asuransi yang tidak sesuai saat penawaran, serta isi polis yang tidak dipahami oleh konsumen. Penipuan, pembobolan rekening, perilaku petugas penagihan pinjaman hingga permasalahan bunga, denda dan penalti juga mewarnai pengaduan yang masuk kepada OJK.

Belajar dari kasus skema ponzi terbesar di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Bernard Madoff, setiap konsumen harus selalu

## Poin Penting UU PPSK

- Pejabat BI, OJK, dan LPS tidak boleh dari partai politik
- OJK mengawasi aset kripto dan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan
- LPS menjamin polis asuransi
- OJK awasi bank emas
- BI diperbolehkan membeli surat berharga pemerintah saat krisis
- OJK mengawasi koperasi *open loop*



waspada dan tidak enggan untuk bertanya serta memeriksa legalitas produk investasi yang ditawarkan kepada OJK. Penipuan yang mengorbankan puluhan ribu orang di 120 negara itu bisa berjalan puluhan tahun karena investornya tidak memeriksa legalitas layanan yang ditawarkan Madoff ketika itu.

## GLOSARIUM

- **Asuransi unit link:** asuransi yang didalamnya ada unsur investasi.
- **Robot trading:** sistem perangkat lunak otomatis yang mampu bekerja secara otomatis untuk memonitor pasar hingga menempatkan transaksi saham dan/atau mata uang asing.
- **Koin kripto:** mata uang digital.
- **Peer-to-peer lending:** layanan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman melalui aplikasi/berbasis teknologi informasi.
- **Emas digital:** emas yang diperdagangkan melalui *platform online*.

# Pesantren dan Peluang Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat

Sebaik-baiknya manusia, adalah yang membawa manfaat bagi orang lain.

**KALIMAT YANG DINUKIL** dari hadis Nabi Muhammad tersebut, jadi salah satu kutipan yang sering disampaikan di pondok pesantren (ponpes). Pesan yang disampaikan memang baik dan nilai tersebut tak lekang oleh waktu. Cocok disampaikan di zaman apa pun. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di pesantren, para ustadz yang mengajarkan ilmu agama kepada para santri sudah pasti membawa manfaat. Tidak hanya bermanfaat bagi santri, ilmu tersebut bisa disebarkan lagi kepada masyarakat. Tradisi tersebut, masih tetap terjaga sampai hari ini.

Seiring perkembangan zaman, ada fenomena menarik dari banyak lembaga pesantren di Indonesia. Saat ini, muncul semangat baru dari pengelola pesantren untuk memberikan bekal lebih kepada para santri. Tidak sebatas ilmu agama, tapi juga ilmu ekonomi dan kewirausahaan.

Hal tersebut sejalan dengan anjuran dan ajakan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau mengajak



berbagai pondok pesantren untuk berkontribusi dalam upaya bersama menggerakkan ekonomi umat.

"Satu fungsi yang dilaksanakan, pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian umat, supaya tidak menjadi beban tapi memberikan kontribusi supaya umat menjalankan perintah Allah, 'Dia yang menjadikan kamu dari Bumi untuk memakmurkan Bumi'. Untuk bisa makmur, harus ada 'asbabul imarah', kegiatan ekonomi," kata Kiai Ma'ruf Amin dalam Multamar XV Pondok Pesantren As'adiyah di Sulawesi Selatan, Desember tahun 2022.

## Geliat ekonomi dari pesantren

Saat ini semakin tumbuh semangat

**Tak hanya menyelesaikan masalah para santri, pesantren ini juga membantu menyelesaikan masalah ekonomi warga di sekitar pesantren. Laba bersih usaha laundry di Ponpes Al-Muttaqien juga terbilang menawan, Rp30 juta per bulan.**

kewirausahaan di lingkungan pesantren. Berbagai jenis dan model bisnis sudah dijalankan beberapa pesantren di Indonesia. Beberapa pesantren bahkan sudah meraih sukses dan berhasil mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi salah satu percontohnya. Pesantren di daerah dataran tinggi Bandung ini berhasil mengembangkan dan membentuk perekonomian pertanian digital.

Pondok pesantren ini membentuk koperasi dengan jumlah anggota lebih dari 1.000 orang. Sekitar 270 petani menggarap lahan seluas 130 hektar di area sekitar pesantren. Ponpes Al-Ittifaq mampu memproduksi dan memasok sayuran ke pasar-pasar modern hingga dua ton setiap hari. Omzet yang dihasilkan terbilang fantastis, yaitu Rp450 juta per bulan.

Kisah sukses pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat bukan hanya milik Ponpes Al-Ittifaq semata. Pondok Pesantren Al-Muttaqien di Balikpapan adalah contoh lainnya. Pesantren ini berhasil mengembangkan usaha laundry di bawah manajemen pesantren.

Karyawan laundry ini berasal dari masyarakat sekitar Ponpes Al-Muttaqien. Pelanggannya adalah para santri dan masyarakat Balikpapan. Usaha laundry di

pesantren ini, ternyata berhasil mengatasi masalah klasik, yaitu tertukarnya pakaian santri yang kadang membuat bingung.

Tak hanya menyelesaikan masalah para santri, pesantren ini juga membantu menyelesaikan masalah ekonomi warga di sekitar pesantren. Laba bersih usaha laundry di Ponpes Al-Muttaqien juga terbilang menawan, Rp30 juta per bulan.

## Pengembangan produk halal berbasis pesantren

Peluang pesantren untuk mengembangkan perekonomian, khususnya produk halal terbuka sangat lebar. Pertama, pengelola dan pengasuh pesantren sangat memahami definisi produk halal dan bagaimana cara memproduksinya. Kedua, peluang produk halal di Indonesia sangat besar, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim paling banyak di dunia.

Kiai Haji Ma'ruf Amin menambahkan bahwa seluruh pesantren harus digerakkan menjadi

pusat pemberdayaan masyarakat. Ia mendorong agar setiap pesantren menerapkan kebijakan *one pesantren, one product* (OPOP).

Sebelum pandemi, beberapa pesantren yang tergabung dalam program OPOP berangkat ke Turki untuk mengikuti 7<sup>th</sup> OIC Halal Expo dan 5<sup>th</sup> World Halal Summit 2019. Lima koperasi pesantren tersebut, yakni Darut Tauhid Kota Bandung, Al-Ittifaq Kabupaten Bandung, Al-Ashriyyah Kabupaten Bogor, Al-Idrisiyyah Kabupaten Tasikmalaya, dan Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan.

Dalam dua even tersebut, kelima pondok pesantren itu memamerkan produk unggulan, memperluas pasar, diskusi, dan bertukar ide terkait kemandirian ekonomi ponpes maupun sertifikasi halal. Setelah pandemi berakhir, ikhtiar seperti ini harus dilanjutkan dan terus dikembangkan. Semakin banyak pesantren yang mengembangkan kewirausahaan, semakin besar peluang akselerasi perekonomian nasional.

## Potensi Ekonomi Pesantren di Indonesia\*

**34.652**

Jumlah pesantren di Indonesia

**4,76 juta**

Jumlah santri di Indonesia

**15.246**

Pesantren berpotensi ekonomi

**1.845**

Pesantren dengan potensi koperasi, UKM, dan ekonomi syariah

**1.479**

Pesantren dengan potensi agribisnis

**1.141**

Pesantren dengan potensi perkebunan

**1.053**

Pesantren dengan potensi peternakan

\*Data Kementerian Agama RI





## Emas, Investasi yang Tak Bikin Cemas

Investasi emas dianggap sebagai investasi paling aman di dunia. Hal ini berdasar pengalaman yang sudah berlangsung ribuan tahun.

**A**pakah investasi terbaik yang bisa dipilih? Masing-masing orang tentu punya jawaban dan pendapat yang berbeda-beda. Tapi bila bertanya kepada Fabrizio Moreira, ia sepertinya akan menjawab dengan cepat: emas.

Pebisnis asal Ekuador yang sekarang bermukim di Amerika ini punya pendapat terkait emas dan investasi. "Berinvestasi emas adalah salah satu keputusan paling bijak yang dapat diambil oleh investor." Begitu kata Fabrizio Moreira.

Apa pasal Fabrizio sampai mengatakan bahwa emas adalah pilihan investasi terbaik? Salah satunya tentu berdasar pengalaman panjang. Emas adalah salah satu

bentuk investasi paling kuno di dunia. Emas sudah digunakan oleh Kekaisaran Mesir tahun 1500 SM. Emas juga dijadikan alat tukar resmi pertama untuk perdagangan internasional.

Perjalanan waktu yang panjang selama ribuan tahun membuktikan bahwa emas menjadi salah satu aset yang aman untuk disimpan dalam waktu lama. Emas termasuk salah satu aset *safe haven*. Saat terjadi gejolak ekonomi pun, nilainya akan tetap bertahan atau bahkan meningkat. Tidak akan anjlok secara drastis seperti investasi lain seperti saham.

"Secara *historical* untuk jangka panjang emas minimal sama dengan inflasi. Jadi ketika memiliki emas,

seseorang tidak akan turun nilai asetnya karena inflasi. Bahkan untuk jangka sangat panjang, nilainya di atas inflasi," kata Perencana Keuangan Eko Indarto dari Finansia *Consulting*.

Alasan itulah yang membuat emas termasuk sebagai investasi yang membuat hati tenang dan tak bikin cemas. Nilainya tidak mungkin melorot tajam dan cenderung naik, khususnya di masa krisis. Belajar pada beberapa krisis ekonomi yang terjadi seperti saat pandemi dan krisis tahun 2008, nilai emas kenaikannya lebih tinggi dibanding saat ekonomi stabil.

Bila memiliki modal yang longgar, tak ada salahnya mempersiapkan uang untuk membeli emas. Hal ini terkait dengan prediksi ketidakstabilan

ekonomi di tahun 2023. Dalam kondisi seperti ini, nilai emas kemungkinan akan cenderung naik. Bila ekonomi stabil, emas tetap bisa dijadikan pilihan investasi jangka panjang.

### Pilihan investasi emas digital

Kemajuan teknologi membuat investasi emas saat ini semakin mudah, tidak harus datang ke toko penjualan emas dan mengantri untuk membeli logam mulia. Sekarang, pembelian emas bisa dilakukan secara digital.

Tinggal buka ponsel pintar, klik aplikasi penyedia investasi atau penjualan emas, lalu sudah bisa memulai investasi emas. Hebatnya lagi, konsep investasi atau menabung emas sekarang ini bisa dimulai dengan dana puluhan ribu rupiah saja. Sangat terjangkau.

Investor sekarang tak lagi harus menyiapkan uang ratusan ribu atau

emas dalam bentuk fisik yang dijual secara digital atau *online*.

Kedua adalah emas derivatif. Meskipun sama-sama diperjualbelikan secara digital, tapi emas derivatif berbeda dengan emas konvensional. Bila emas konvensional ada bentuk fisiknya seperti emas batangan, emas derivatif tidak berupa fisik.

"Untuk investasi jangka panjang, saran saya kembali ke *basic* yaitu emas dalam bentuk fisik. Pastikan saat kita bertransaksi akan ada fisik yang bisa diperoleh di depannya. Pastikan juga legalitasnya. Ini penting karena emas fisik tidak termasuk investasi yang diawasi OJK," Eko Endarto melanjutkan.

Lantas bagaimana bila ingin berinvestasi pada produk emas derivatif? Sebenarnya tidak masalah. Hanya saja, perlu kehati-hatian, agar kasus Tamasia tidak terulang. Saat

### Bila emas konvensional ada bentuk fisiknya seperti emas batangan, emas derivatif tidak berupa fisik.

bahkan jutaan untuk memulai investasi emas. Skemanya berbeda dengan pembelian emas secara fisik yang harus menyiapkan dana tunai cukup besar.

Meskipun menawarkan kemudahan, tapi tetap harus berhati-hati dalam memilih investasi emas digital. Sebab, belum lama ini penyedia aplikasi investasi emas Tamasia menjadi sorotan publik terkait transaksi di aplikasi tersebut.

Tamasia meminta penggunanya untuk menjual emasnya dengan harga di bawah pasaran. Hal tersebut membuat pembeli atau investor jadi galau. Mereka bingung, karena bila dilepas maka investasinya akan merugi. Sementara bila tidak dijual, ada risiko rugi bila perusahaan tersebut bermasalah kemudian hari.

Secara umum ada dua jenis produk emas digital. Pertama adalah jenis emas konvensional yang didigitalkan, sehingga menjadi produk finansial teknologi. Jenis produk ini adalah

memilih produk atau aplikasi penjualan emas derivatif, pastikan perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan regulator yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Bila perusahaan tersebut tidak di bawah pengawasan Bappebti, segera tinggalkan dan batalkan. Meskipun mereka menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Risiko terlarut besar. Bukannya untung yang meningkat, bisa jadi buntung yang akan didapat.

### GLOSARIUM

• **Safe haven:** Jenis investasi yang diharapkan nilainya tetap bertahan atau meningkat ketika terjadi turbulensi di pasar.

• **Nilai spread:** nilai selisih antara harga jual dan harga beli yang dibebankan kepada trader (penjual) oleh broker dari sebuah transaksi.

• **Emas derivatif:** Produk investasi emas tidak dalam bentuk fisik.

## Kelebihan dan kekurangan investasi emas

### Kelebihan

- Harga cenderung naik dalam jangka panjang. Kenaikannya biasanya di atas inflasi.
- Nilai emas tahan terhadap resesi. Saat pandemi nilai emas cenderung naik lebih tinggi. Sementara saham cenderung turun.
- Mudah diuangkan. Saat perlu dana tunai cepat, emas sangat mudah dijual.
- Bebas biaya perawatan. Investasi emas bebas dari biaya perawatan dan lainnya.
- Bisa dengan modal kecil. Untuk investasi emas dalam bentuk logam mulia, bisa dimulai dari modal puluhan ribu rupiah.

### Kekurangan

- Kurang cocok untuk investasi jangka pendek. Nilai hanya meningkat sedikit dalam jangka pendek.
- Kenaikan nilainya lambat. Kenaikan nilai emas cenderung lambat, hal ini tidak lepas dari risiko yang rendah.
- Ada risiko kehilangan. Bila emas dalam bentuk fisik disimpan di rumah, ada risiko hilang.
- Perlu biaya tambahan bila ingin menjaga keamanannya. Seperti menyewa *safe deposit box*.
- Nilai *spread* tinggi. Untuk investai emas, nilai *spread* sekitar 11% per gram.



# Suara Konsumen, dari Asuransi hingga Pinjol



Masih ingat kasus Indra Bekti yang proses klaim asuransinya ditolak? Permasalahan masa tunggu jadi penyebab klaim asuransi Indra Bekti ditolak. Masa tunggu asuransi Indra Bekti baru bisa diklaim setelah satu tahun. Sementara Indra Bekti baru ikut asuransi beberapa bulan. Masa tunggu menjadi hal yang sering dikeluhkan konsumen asuransi. Bisa karena nasabah tidak membaca detail syarat dan ketentuan, bisa juga agen asuransi tidak menjelaskan secara gamblang. Akibatnya, banyak aduan mengenai gagal klaim karena masa tunggu ini. Jangka waktu pembayaran klaim menurut keputusan Menteri Keuangan No 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggara usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah 30 hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, tetapi hal ini kadang

OJK mencatat hampir 90% dari pengaduan telah terselesaikan seperti yang diungkap Ketua OJK Mahendra Siregar.

atau tidak disebutkan dalam perjanjian. Kasus lain, perusahaan asuransi menaikkan biaya asuransi di atas 63% tanpa penjelasan. Sering juga terdengar, perusahaan asuransi menolak klaim uang pertanggungan dan membatalkan polis secara sepihak. Kasus tambahan yang terkait masalah komunikasi yaitu informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya tepat karena terdapat biaya-biaya yang tidak dicover asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi wajib memberikan alasan di awal maupun saat proses klaim diajukan. Informasi yang diberikan harus tepat dan transparan. Perusahaan asuransi juga harus melakukan investigasi dengan cermat

Data Layanan dan Kontak OJK  
**Data Pengaduan Triwulan I Tahun 2023**  
Periode 1 Januari 2023 – 28 Februari 2023

Perbankan	IKNB - Asuransi	IKNB - Pembiayaan	Pasar Modal	Fintech
1.463	184	615	16	537
Restrukturisasi kredit/pinjaman	Kesulitan klaim	Restrukturisasi pembiayaan/pinjaman	Kegagalan atau keterlambatan transaksi	Perilaku petugas penagihan
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Produk tidak sesuai saat penawaran	Perilaku petugas penagihan	Return/imbal hasil/margin keuntungan	Restrukturisasi pembiayaan/pinjaman
Perilaku petugas penagihan	Persoalan premi asuransi	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Pemindahan dana	Penipuan (pembobolan rekening, skimming, phishing, social engineering)
Permasalahan agunan	Persoalan isi polis yang tidak diketahui dan dipahami konsumen	Sanggahan transaksi	Produk/layanan tidak sesuai penawaran	Return/imbal hasil/margin keuntungan
Penolakan pelunasan kredit/pembiayaan dipercepat	Pembatalan atau penutupan polis	Permasalahan agunan	Transaksi tanpa persetujuan	Permasalahan bunga/denda/pinalti

Data Layanan dan Kontak OJK  
**Data Pertanyaan Triwulan I Tahun 2023**  
Periode 1 Januari 2023 – 28 Februari 2023

Perbankan	IKNB - Asuransi	IKNB - Pembiayaan	Pasar Modal	Fintech
10.183	1.115	4.070	38	9.098
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Kesulitan klaim	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Legalitas LJK dan produk	Perilaku petugas penagihan
Penipuan (pembobolan rekening, skimming, phishing, social engineering)	Produk tidak sesuai saat penawaran	Perilaku petugas penagihan	Pencairan dana Return/Imbal Hasil/Margin Keuntungan	Legalitas LJK dan produk
Perilaku petugas penagihan	Legalitas produk dan LJK	Penipuan (pembobolan rekening, skimming, phishing, social engineering)	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Restrukturisasi Pembiayaan/Pinjaman
Restrukturisasi Kredit/ Pinjaman Legalitas produk dan LJK	Persoalan isi polis yang tidak diketahui dan dipahami konsumen	Restrukturisasi Pembiayaan/Pinjaman	Penipuan (pembobolan rekening, skimming, phishing, social engineering)	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
	Persoalan Premi Asuransi	Sanggahan transaksi		Permasalahan Bunga/Denda/Pinalti

dan seksama, sehingga nasabah tidak terlalu lama menunggu jawaban. Asuransi hanya salah satu bentuk pengaduan ke OJK. Masih ada banyak pengaduan lain ke OJK. Berdasarkan data layanan dari Kontak OJK 157, selama tahun 2022 OJK menerima 315.783 layanan konsumen. Layanan tersebut terdiri dari 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Sebanyak 7419 merupakan pengaduan sektor perbankan, 7.252 pengaduan sektor IKNB dan sisanya layanan sektor pasar modal. OJK mencatat hampir 90% dari pengaduan telah terselesaikan seperti yang diungkap Ketua OJK Mahendra Siregar. Sedangkan berdasarkan informasi data pengaduan selama kurun waktu Jan-Feb 2023 yang diterima melalui Kontak OJK 157 terkait Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) cukup banyak. Total aduan sebanyak selama dua bulan ini sudah sebanyak 19% dari total pengaduan di tahun 2022 atau sebesar 2.815 aduan. Adapun aduan terbagi menjadi 1.463 masalah Perbankan, 184 IKNB Asuransi, 615 IKNB Pembiayaan, 16 aduan dari sektor pasar modal dan 537 dari PUJK fintech. Berdasar data di atas, OJK akan terus melakukan tindakan perlindungan konsumen melalui langkah preventif, maupun kuratif. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id, Whatsapp 081157157157 dan email konsumen@ojk.go.id. OJK juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa keuangan untuk lebih cermat dan teliti dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Cara ini terus dilakukan agar konsumen di Indonesia terlindungi dengan baik.

# Berani Investasi di Reksa Dana Terproteksi

**S**iapa bilang investasi pasti mahal dan risikonya tinggi? Ada juga pilihan reksa dana dengan biaya relatif terjangkau dan relatif aman. Bila menginginkan investasi jenis ini, reksa dana terproteksi bisa jadi pilihannya.

Reksa dana terproteksi melindungi 100% pokok investasi investor pada saat jatuh tempo. Inilah kelebihan dari reksa dana terproteksi. Investor tak perlu khawatir akan mengalami kerugian meski kondisi ekonomi atau pasar tengah fluktuatif.

Reksa dana terproteksi memiliki manfaat, risiko, kewajiban, serta cara membeli yang relatif sama dengan produk reksa dana lainnya. Bila dilakukan dengan cermat, reksa dana terproteksi dapat menjadi pilihan menjanjikan untuk berinvestasi.

## Karakteristik

Reksa dana terproteksi memiliki setidaknya tiga karakteristik khusus yang membedakannya dengan produk reksa dana lainnya.

Pertama, adalah masa dan unit yang terbatas. Artinya, reksa dana terproteksi memiliki jangka waktu investasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajer investasi. Selain itu, investor hanya dapat membeli reksa dana ini pada saat tertentu saja.

Kedua, reksa dana terproteksi juga mengenal adanya jatuh tempo. Saat akan memulai investasi, manajer investasi sudah akan memiliki tanggal yang disepakati sebagai waktu pembubaran reksa dana ini.

Ketiga, adanya indikasi *return*. Artinya manajer investasi diperbolehkan memberi perkiraan imbal

## Ciri Reksa Dana Terproteksi

- Pokok investasi diproteksi 100% hingga tanggal jatuh tempo.
- Pokok investasi tidak akan optimal jika dana investasi dicairkan /menjual unit penyertaan sebelum jatuh tempo periode investasi.
- Jangka waktu investasi dan periode pembagian hasil investasi ditentukan oleh Manajer Investasi.
- Calon investor hanya dapat melakukan investasi pada masa penawaran berlaku.

hasil atau *return*. Besaran indikasi *return* diperoleh dari bunga atau kupon surat utang setelah dikurangi dengan faktor biaya dan pajak.

## Risiko

Hal paling utama yang harus diperhatikan dari reksa dana terproteksi adalah risiko gagal bayar atau wanprestasi. Ketika perusahaan penerbit mengalami gagal bayar, semua indikasi *return* dan proteksi atas pokok investasi akan hilang.

Investor harus memerhatikan perusahaan penerbit dan peringkat surat utang yang akan diinvestasikan. Reksa dana terproteksi hanya boleh berinvestasi pada surat utang yang masuk kategori layak investasi.

Risiko lain yang mungkin terjadi adalah menurunnya harga obligasi karena pihak penerbit gagal membayar utang obligasi.





## Angka-angka yang Menjanjikan

**Gonjang-ganjing dunia** akibat Pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, berdampak pada krisis energi di berbagai di berbagai negara maju. Imbasnya, memperlambat berbagai sektor ekonomi dunia termasuk di kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, di Indonesia justru beberapa indikator terlihat menjanjikan. Pemerintah, pada awal tahun mengumumkan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 mencapai 5,3%. Sebelumnya, berdasarkan data yang diluncurkan OJK di awal tahun 2023, indikator positif tampak dari Bergeraknya industri keuangan dalam negeri.



# 833

PERUSAHAAN

Menutup tahun 2022 lalu, OJK mencatat sebagai tahun pertumbuhan emiten tertinggi dalam 7 tahun belakangan ini dengan adanya penambahan 71 emiten baru. Tahun 2021 penambahan emiten mencapai 56. Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bank Indonesia (BI), sampai Januari 2023 ada 833 perusahaan yang melantai di bursa saham dalam negeri. Sebelumnya, di akhir tahun 2022 tercatat total emiten mencapai 825.



## Rp200 triliun

Target nilai emisi yang dicanangkan pada tahun 2023. Angka ini diyakini akan bertambah bila didukung dengan kondisi perekonomian yang lebih baik.



Pembelian neto investasi nonresiden pada SBN di Januari 2023.



## Rp90 triliun

Nilai pertumbuhan premi asuransi umum mengalami kenaikan 15,3% pada tahun 2022 menjadi Rp90,12 triliun.

# Inovasi Pembayaran Digital, “Senjata” Wajib Bisnis UMKM

Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku hidup masyarakat. Sejak Covid menyerang, penduduk dunia dipaksa untuk mulai membiasakan diri dengan perangkat digital. Salah satu perubahan besar adalah penerapan metode transaksi digital.

**M**enariknya, pembatasan kegiatan di masyarakat mempercepat proses transaksi digital. Perubahan kebiasaan ini bisa dilihat dari data yang dipaparkan oleh salah satu perusahaan teknologi finansial.

Pada tahun 2021, dompet digital menjadi *platform* pembayaran digital paling populer. Perusahaan tersebut mencatat pertumbuhan penggunaan dompet digital yang dilakukan oleh pedagang (*merchants*) meningkat lebih dari 300%. Bahkan, November 2021, hampir setengah dari *merchants* sudah menyediakan kanal dompet digital khusus untuk menerima pembayaran.

## Anak Muda Pengguna Utama

Awal tahun 2021, sebuah gerobak sate bernuansa Jepang menjadi perbincangan hangat di linimasa media sosial. Gerobak kayu berwarna merah itu selalu ramai hampir di setiap malamnya. Di sisi muka gerobak itu terbentang sebuah nama “IROTIKAY”, masih dengan nuansa merahnya. IROTIKAY merupakan sebuah jenama UMKM yang menjual berbagai olahan sate ala Jepang.

Februari 2022, IROTIKAY melakukan ekspansi dan bertransformasi menjadi sebuah bar, tidak jauh dari lokasi awalnya. Tiga pemilik jenama ini meningkatkan level bisnis mereka. Kini, IROTIKAY telah menjelma menjadi

sebuah ruang sosial. Ruang bertemu dan bercengkrama anak-anak muda Jakarta.

Menariknya, salah satu faktor yang mendorong peningkatan bisnis IROTIKAY adalah keberanian dan rasa percaya diri untuk menerapkan sistem pembayaran digital sejak awal dirintis. Tidak ada riset tertentu yang dilakukan. Ketiga pemilik hanya berkaca dari perilaku keseharian mereka dan teman-teman di sekitarnya yang sudah sangat jarang melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang fisik.

Bella Hutabarat, salah satu pemilik IROTIKAY bercerita, sistem pembayaran digital sangat mempermudah segala proses

keuangan bisnis. Tidak hanya sebagai media transaksi pembayaran, sistem digital juga digunakan untuk pemesanan bahan baku pada pemasok hingga melakukan pembayaran gaji karyawan yang bisa langsung dilakukan melalui transfer bank.

“Terlebih, transparansinya jelas. Tidak takut akan ada penyimpangan (*human error*) di bagian keuangan atau bahkan harus repot-repot melakukan rekapitulasi manual. Bagi pelanggan IROTIKAY yang kebanyakan adalah anak-anak muda, sistem pembayaran digital juga dirasakan sangat praktis. Tinggal pindai, klik, bayar,” tutur Bella.

Pengalaman yang dilakukan Bella dan dua kawannya seperti menjawab hasil riset Ipsos, perusahaan riset global asal Perancis dan juga perusahaan riset terbesar ke-3 di dunia dan di Indonesia yang dilakukan pada 20 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020.

Ipsos melakukan riset pada 500 responden di lima kota besar di Indonesia: Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palembang dan Manado yang didominasi oleh segmen milenial (lahir di tahun 1980 hingga 1996) dan generasi Z (lahir di tahun 1997 hingga 2002) dengan kelas ekonomi menengah ke bawah yang memiliki



kancah pembayaran digital setelah beragam QR code yang ditawarkan beberapa perusahaan penyedia jasa pembayaran. Meskipun pendatang baru, QRIS langsung menjadi andalan masyarakat dalam bertransaksi.

Dari riset yang dilakukan salah satu perusahaan penyedia jasa pembayaran, pada 2021, QRIS langsung menempati peringkat ketiga sebagai *platform* pembayaran digital terpopuler, bahkan mengalahkan penggunaan kartu kredit. Bank Indonesia mulai memperkenalkan QRIS pada tahun 2019. Regulasi pemerintah yang mengatur bahwa semua pembayaran digital dapat difasilitasi cukup melalui satu kode

seperti dengan konsumen, metode pembayaran ini sudah pasti aman dan cepat. Selain itu, catatan transaksi juga tersedia, sehingga memudahkan membuat laporan keuangan. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan potensi bisnis, karena transaksi lebih cepat dan tidak terjadi kesalahan bayar. Hal inilah yang membuat pengguna QRIS di pelaku UMKM terus meningkat.

Melalui keterangan resmi pada 29 Agustus 2022, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa hingga Agustus 2022 sudah ada sekitar 20 juta *merchant* QRIS di seluruh Indonesia. Sebanyak 90% di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Perry Warjiyo bahkan memberikan prediksi transaksi uang elektronik tahun 2023 yang akan meningkat menjadi Rp508 triliun. Angka yang sangat fantastis. Melihat proyeksi ini, rasanya semua pelaku UMKM wajib bergabung dengan ekosistem transaksi digital agar potensi ekonomi bisa melesat lebih cepat.

## Manfaat Pembayaran Digital untuk Bisnis

Pemangku kebijakan ekonomi dan keuangan di Indonesia terus mendorong pertumbuhan transaksi digital. Inilah beberapa manfaat dari transaksi digital:

- Memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.
- Memudahkan penghitungan omzet dan melakukan proyeksi pengembangan bisnis.
- Efisiensi tempat, waktu, dan tenaga.
- Memperluas jangkauan usaha.
- Mempermudah pencatatan keuangan.
- Mengurangi risiko kesalahan hitung.

**Hingga Agustus 2022 sudah ada sekitar 20 juta merchant QRIS di seluruh Indonesia. Sebanyak 90% di antaranya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).**

potensi terbesar sebagai pengguna dompet digital. Hasilnya, 68% generasi muda Indonesia tersebut menggunakan dompet digital minimal satu hingga dua kali dalam seminggu dengan rata-rata nilai top up sebesar Rp 140.663 setiap minggunya.

## QRIS, Praktis dan Aman

QR code atau Quick Response Indonesian Standard (QRIS) merupakan fasilitas pembayaran digital yang disediakan oleh Bank Indonesia (BI). QRIS adalah pendatang baru di

yang sama, dipercaya sebagai pendorong minat masyarakat menggunakan layanan QRIS.

Kepraktisan bagi konsumen jadi salah satu alasan QRIS lekas populer. Keunggulan lain dari QRIS adalah efisien, aman, dan cepat. Melalui kode khusus, transaksinya terjamin aman dan cepat. Konsumen juga tidak perlu berutang seperti halnya dengan kartu kredit.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) QRIS juga memberikan banyak manfaat. Sama



# Investasi Sesuai Siklus Hidup

Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi saat ini semakin meningkat. Berdasarkan survei dari lembaga riset Populix tahun 2022, 72% orang yang disurvei sudah memulai investasi.



Meningkatnya kesadaran ini perlu diikuti dengan pemahaman investasi sesuai dengan siklus hidup. Kemampuan ini dapat membantu seseorang menyusun strategi investasi yang efektif di setiap tahap hidup.

Tujuannya agar bisa memastikan investasinya bisa mendapatkan hasil terbaik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk investasi berdasarkan siklus hidup, baca panduan di bawah ini.

## Tiga Tahap Investasi Sesuai Siklus Hidup

### 1. Tahap Akumulasi (Usia: 20-35)

Tujuan jangka pendek investasi di tahap ini adalah membangun tabungan darurat. Sedangkan tujuan jangka panjangnya mengumpulkan kekayaan melalui instrumen investasi dengan imbal hasil tinggi.

Pada usia 20-35 tahun, biasanya seorang anak muda sudah bekerja. Sebagai pribadi yang sedang memulai meniti karir, nilai kekayaan yang dimiliki relatif masih terbatas. Namun dengan rentang waktu yang masih jauh dari masa pensiun, seorang investor dapat membangun portofolio secara agresif.

Di rentang usia ini jika seseorang kehilangan modal investasinya, dia masih punya waktu yang cukup untuk membangun kembali keuangan dan juga berkesempatan menunggu investasi yang masih rugi untuk berbalik menjadi untung.

Pada rentang usia ini, jika ingin berinvestasi pada instrumen *high risk high return*, maka saham bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa dicoba. Tapi perlu diingat juga, sebaiknya tetap "menaruh telur di keranjang yang berbeda." Perlu juga investasi

yang aman, meskipun *gain*-nya tidak terlalu tinggi, salah satunya emas.

### 2. Tahap Persiapan Pensiun (Usia: 35-54)

Tujuan jangka pendek investasi mungkin termasuk untuk liburan dan mendanai pendidikan anak. Sementara tujuan jangka panjangnya pada tahapan ini adalah menyiapkan modal untuk menjalani hidupnya di masa pensiun.

Pada tahap ini, seseorang kemungkinan besar telah mencapai pendapatan puncaknya sehingga dia dapat menabung dan berinvestasi lebih banyak. Kemampuan ini harus dimanfaatkan dengan melakukan diversifikasi investasi.

Investasi yang dilakukan di masa muda seperti emas dan saham perlu untuk dilanjutkan. Hasil investasi maupun tabungan yang dimiliki bisa

Selain faktor usia, tingkat toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda juga dipengaruhi oleh lingkungan, pengetahuan, pendapatan, dan tanggungan keuangan tiap investor.

digunakan untuk investasi yang nilainya lebih tinggi seperti properti.

### 3. Tahap Pensiun (Usia 55+)

Pada tahap ini, seseorang kemungkinan berhenti mendapatkan penghasilan aktif, khususnya yang berstatus sebagai karyawan. Sebagian orang, penghasilannya akan mulai melambat di usia ini meskipun tidak semua. Investor yang telah memasuki masa pensiun akan lebih cocok untuk mengambil produk investasi dengan risiko kecil dan lebih stabil.

Pada tahapan pensiun, prioritas investasi bergeser dari mengakumulasi kekayaan menjadi mengamankan modalnya jangan sampai hilang atau berkurang. Emas dan properti bisa dilanjutkan. Emas mudah diuangkan bila perlu dana darurat. Properti bisa memberi pemasukan reguler bila disewakan seperti apartemen, rumah kontrakan, atau kos-kosan.

Di masa pensiun ini, pastikan tidak mudah tergiur dengan investasi dengan imbal balik yang super tinggi, tapi tanpa risiko. Tidak pernah ada investasi dengan imbal balik tinggi, tapi tanpa risiko. Ingat selalu 2L: Legal dan Logis agar terhindar dari tawaran investasi bodong.

## Berinvestasi Sesuai Risiko Investasi

Gambaran umum mengenai berinvestasi sesuai siklus hidup tidak selamanya berlaku sama bagi setiap orang. Kemampuan investor bertoleransi terhadap risiko terkadang tidak melekat pada usia seseorang ataupun sesuai dengan tahapan berinvestasi.

Seorang yang memiliki penghasilan tak tentu seperti *freelancer*, maka kemampuannya dalam mentolerir risiko berinvestasi akan lebih rendah dibanding dengan investor dengan pendapatan tetap. Seseorang yang berpengetahuan di bidang investasi, meski sudah berusia lanjut, memiliki toleransi tinggi terhadap risiko investasi. Seseorang dalam situasi memiliki tanggungan yang besar, tingkat toleransi risiko terhadap investasi pastilah rendah.

Selain faktor usia, tingkat toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda juga dipengaruhi oleh lingkungan, pengetahuan, pendapatan, dan tanggungan keuangan tiap investor. Hal ini memengaruhi profil risiko investasi. Seorang investor perlu memahami profil risiko investasi untuk membantunya menentukan alokasi aset investasi yang tepat untuk portofolio.

## Instrumen Investasi Menurut Tingkat Risiko

1

**Risiko Rendah:** Imbal hasil rendah, aman dan stabil. Masuk dalam kategori ini misalnya deposito, obligasi, atau emas.

2

**Risiko Menengah:** Instrumen yang memberi tingkat imbal hasil di atas deposito, contohnya, reksa dana.

3

**Risiko Tinggi:** Imbal hasil tinggi sesuai dengan risikonya. Contoh investasi di kategori ini adalah saham dan reksa dana saham.

**BERNIE MADOFF**

# Penipu Skema Ponzi Terbesar Sepanjang Sejarah

*The Monster of Wall Street* jadi salah satu film seri bertema keuangan yang sangat populer di salah satu *platform live streaming*. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang sosok Bernard (Bernie) Lawrence Madoff.

**I**a adalah seorang penipu ulung dengan korban puluhan ribu investor di 125 negara. Kerugian investor akibat ulah Bernie hampir 65 miliar dollar AS atau setara Rp 992 triliun. Akibat kejahatannya, ia dihukum 150 tahun penjara namun meninggal dunia dalam penjara federal Butner, North Caroline, Amerika Serikat, pada April tahun 2021.

Bernie, merupakan sosok terkemuka dalam industri keuangan di Wall Street. Pada usia 22 tahun ia mendirikan perusahaan yang diberi nama Bernard L. Madoff Investment Securities dengan modal \$5.000. Bisnisnya berdagang saham di luar bursa New York, berisiko tinggi namun menjanjikan keuntungan besar. Di samping itu, Bernie juga memulai usaha sampingan sebagai penasihat keuangan yang mengelola uang investor untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka.

Dengan bantuan ayah mertuanya Saul Alpern, yang seorang akuntan, Bernie mendapatkan 20-24 investor pertamanya. Saat harga saham anjlok, pada tahun 1962, dana kelolaan Bernie senilai total \$30,000 hangus karena digunakan untuk membeli saham yang berisiko tinggi.

Bernie meminjam uang kepada Saul untuk menggantikan uang klien-kliennya. Para investornya menilai Bernie sukses mengelola uang tanpa kerugian sedikit pun.

Pada tahun 2008, saat AS mengalami krisis keuangan yang dipicu oleh kredit macet di sektor properti, di tahun ini penipuan Bernie ikut terkuak. Harga saham anjlok, semua investor ingin uangnya kembali. Sementara, rekening perusahaannya hanya bersaldo 300 juta dolar AS.

Ternyata Bernie tidak pernah benar-benar menggunakan uang kliennya untuk diinvestasikan. Selama itu ia hanya mengirimkan laporan pembelian saham palsu dan membayarkan keuntungan yang ia janjikan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan investor berikutnya.

Bernie ditangkap pihak berwenang pada Desember tahun 2008 setelah mengakui perbuatannya kepada dua anaknya Mark dan Andrew Madoff. Ribuan kliennya jatuh miskin, kehilangan rumah mereka atau tabungan pensiun mereka. Putra sulung Bernie, Mark bunuh diri pada tahun 2020, tepat dua tahun sejak Bernie ditahan. Sedangkan putra

bungsunya meninggal empat tahun kemudian akibat kanker.

## Kenali ciri-ciri skema ponzi

- 1 Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko.
- 2 Proses bisnis investasi yang tidak jelas.
- 3 Produk investasi biasanya milik luar negeri.
- 4 Staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang.
- 5 Pada saat investor ingin menarik investasi malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi.
- 6 Mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur.
- 7 Pengembalian macet di tengah-tengah.

## Carilah 10 Perbedaan

Keluarga Pak Rachmat adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia, karena sudah melek literasi keuangan. Dalam dua foto Pak Rachmat ini, terdapat 10 perbedaan. **Latih kejelian mata Sobat dengan jawab kuis berikut melalui Instagram Story. Jangan lupa mention @Sikapiuangmu**





Patung Raden Bei Aria Wirjaatmadja di halaman depan Museum BRI.



Diorama pelayanan nasabah di *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*.



Mesin penghitung uang logam.

## Museum BRI Saksi Sejarah Bank Tertua Indonesia

**Di kota berhawa sejuk Purwokerto**, Jawa Tengah berdiri Museum Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menjadi saksi berdirinya bank nasional tertua di Indonesia. Di museum ini, dijelaskan bagaimana awal mula BRI berdiri.

BRI merupakan bank tertua yang berdiri sejak era penjajahan. Bank ini didirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada 16 Desember 1895 di Purwokerto. Saat itu BRI masih bernama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*, sebagai lembaga keuangan milik kaum priyayi Purwokerto.

Pasca Indonesia merdeka, terbitlah Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah Republik Indonesia.

Bila ingin melakukan wisata edukatif terkait keuangan dan bank, langsung datang ke Museum BRI di Jl. Jend. Sudirman No.57, Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

**Disclaimer:** Tulisan ini tidak menganjurkan penggunaan produk dari instansi tertentu. Hanya mengenalkan bangunan bersejarah atau sejarah perbankan dan keuangan di Indonesia.



# INDONESIA SHARIA FINANCIAL OLYMPIAD



BE READY, BE SMART, BE A WINNER!

## SYARAT DAN KETENTUAN

1. Peserta merupakan tim beranggotakan dua mahasiswa/i aktif dari perguruan tinggi yang sama sederajat se-Indonesia.
2. Setiap anggota tim wajib mendaftarkan diri di Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK melalui kode referral berupa **ISFO2023**
3. Setiap tim wajib mengisi 7 modul LMSKU OJK sebagai berikut:
  - 1) Pengenalan OJK dan Waspada Investasi
  - 2) Perencanaan Keuangan
  - 3) Keuangan Syariah tingkat *Basic*
  - 4) Keuangan Syariah tingkat *Intermediate*
  - 5) Perbankan
  - 6) Perasuransian
  - 7) Pasar Modal
4. Apabila sudah memiliki akun LMSKU OJK, maka diwajibkan mendaftar kembali melalui kode referral berupa **ISFO2023**
5. Penilaian berdasarkan nilai tertinggi dan *timestamp* penyelesaian LMSKU OJK.
6. Setelah menyelesaikan 7 modul LMSKU OJK, ketua tim mendaftarkan diri dan menyampaikan data yang diperlukan melalui link: **bit.ly/PendaftaranISFO-PT**
7. Syarat, ketentuan, dan petunjuk teknis olimpiade dapat dipelajari lebih lanjut melalui link: **bit.ly/BookletISFO-PT**
8. Contact person:  
**isfo.ojk.2023@gmail.com**

## TIMELINE



**Periode Pendaftaran**  
10 - 20 April 2023



**Pengumuman**  
4 Mei 2023



**Technical Meeting**  
5 Mei 2023



**Babak Penyisihan I dan II (Online)**  
9 Mei 2023



**Babak Final (Offline)**  
23 Mei 2023

## MATERI OLIMPIADE

Buku Seri Literasi Keuangan tingkat Perguruan Tinggi OJK

**bit.ly/MateriISFO-PT**

Modul *Learning Management System* Edukasi Keuangan OJK

**lmsku.ojk.go.id**

## HADIAH OLIMPIADE

Juara I : Rp10.000.000

Juara II : Rp7.500.000

Juara III : Rp5.000.000

# Majalah Edukasi Konsumen

**Memperoleh Penghargaan pada  
Ajang Indonesia Inhouse Magazine Awards  
(InMa) 2023**

**Kategori: The Best of Magazine Government**

